

**STRATEGI LEMBAGA HIMPUNAN WANITA DISABILITAS  
INDONESIA (HWDI) DALAM PEMBERDAYAAN  
WANITA DISABILITAS DI JAKARTA PUSAT**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Dakwah**

Oleh:



**Pembimbing I : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M,Si**  
**Dosen Pembimbing II: Dr. M. Saifuddin, M.Pdd**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2019 M /1440 H**

**ABSTRAK**  
**Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)**  
**dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas**  
**di Jakarta Pusat.**

**Oleh:**  
**To'atin**

Lembaga HWDI adalah lembaga non-profit yang dibentuk oleh sekumpulan wanita disabilitas dan wanita pemerhati masalah disabilitas, yang terikat atas dasar kesamaan kepentingan dan keserasian dalam usaha dibidang pemberdayaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya wanita disabilitas guna mencapai suatu maksud dan tujuan yang sama. Lembaga HWDI dianggap memiliki fungsi sebagai organisasi yang efektif untuk memberdayakan kesejahteraan wanita disabilitas dengan bantuan fasilitas pemerintah melalui pengesahan dan pengimplementasian kebijakan terkait hak-hak wanita disabilitas. Penelitian ini berangkat dari masalah diskriminasi ganda yang dialami oleh wanita disabilitas, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas social dan lain-lain dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bagaimana strategi lembaga HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas di Indonesia. Adapun subyek atau informan dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dari pengurus dan anggota lembaga HWDI yang dapat memberikan masukan dalam mengungkapkan bagaimana strategi lembaga himpunan wanita disabilitas Indonesia dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita disabilitas di Indonesia, dari informan tersebut penulis akan mencari informan lainnya dan seterusnya hingga data yang diperlukan telah diperoleh. Untuk mempermudah dalam mengambil data lapangan, penulis menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan kegiatan verifikasi data penelitian yaitu dengan melakukan melakukan pengamatan secara berkala. Hasil analisis yang masih bersifat sementara akan dikonfirmasi dengan pencarian informasi terkait dari sumber yang berbeda. Temuan penulis menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan lembaga HWDI dalam meningkatkan keberdayaan kaum wanita dalam perspektif keadilan sosial dan HAM melalui sosialisasi, lobby dan pengembangan kapasitas sistem (jaringan), sehingga wanita disabilitas (anggota HWDI) dapat memperoleh hak-haknya. Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas yang menjadi anggotanya, tersebut dapat berdaya guna, atau mampu mendatangkan manfaat bagi pemenuhan hak-hak wanita disabilitas yang menjadi anggotanya tersebut.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Wanita Disabilitas**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : To'atin

NPM : 1541020110

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia  
(HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas di Jakarta  
Pusat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Bandar Lampung, 2019

To'atin

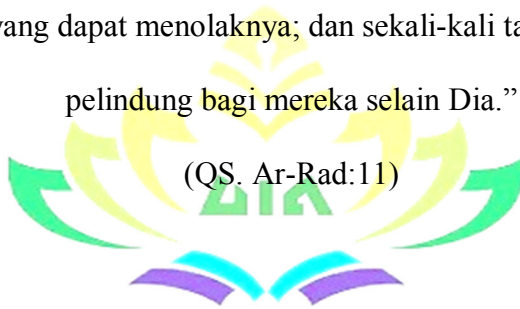
## MOTTO

قُلْ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah  
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada  
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada  
pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Rad:11)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian serta memberi motivasi selama menuntut ilmu.

1. Bapak Maryani dan Mamak Siti Khodijah tercinta yang telah membesarkanku, mendidikku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya mendoakanku dalam setiap munajatnya. Terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah Bapak dan Mamak berikan demi kesuksesanku, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi salah satu hadiah indah untuk Bapak dan Mamak.
2. Kakak Siti Khalimah, Ali Mukhsin, Siti Saniah, Siti Muslimah, Siti Jariah, adik ku tersayang Ahmad Tohir, keluarga besar Kakek Umar Jodho (Alm.) dan Kakek Mukardi (Alm.) yang telah memberikan dukungan moral ataupun materi.
3. Pembimbing akademik Bpk. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses perkuliahan.
4. Bapak dosen pembimbing skripsi Bpk. Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si dan Bpk. Dr. M. Saifuddin, M.Pd, yang telah membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

## **RIWAYAT HIDUP**

To'atin dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 15 Maret 1996. Penulis adalah putri ke 6 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Maryani dan Ibu Siti Khodijah.

Jenjang pendidikan pertama penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Margorejo Kotabumi, Lampung dan tamat pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Kotabumi, Lampung dan tamat pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Hang Tuah Prokimal Lampung dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri, dan terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa suatu kendala yang berarti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yaitu jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

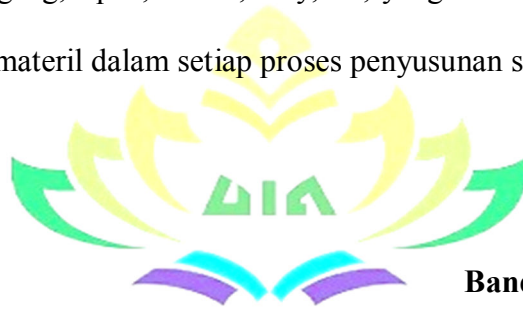
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata I (SI). Adapun skripsi ini peneliti beri judul “**Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Memberdayakan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat**”.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Dr. M. Saifuddin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahannya secara detail dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna.
3. Bapak H. Zamhariri, S.Ag, M. Sos.I, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
4. Bapak Dr. M. Mawardi Jafar, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti selama berada dibangku kuliah.
6. Orangtua ku Bapak Maryani dan Ibu Siti Khodijah, Om Dasuri dan Muhamad Nasir, Bibi Umi, Nur Farida, dan Nurkhosidah, Kakak Ali Muhsin, Siti Khalimah, Siti Saniah, Siti Muslimah, Siti Jariah dan segenap keluarga tercinta, yang senantiasa selalu memberikan doa, nasehat, semangat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril maupun materil, yang tak pernah putus, serta adik ku tersayang Ahmad Tohir.
7. Ibu Maulani A. Rotinsulu, dan Ibu Walin Hartati yang telah mengizinkan serta memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (DPP HWDI), beserta staf DPP HWDI yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.
8. Ardiansah yang selalu memberikan dukungan baik materil dan moril, bimbingan, serta perhatiannya selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Kakak-kakak tingkat Nurlela yang telah sabar dan banyak memberikan bimbingannya, Elia, Laila Nur Maslia, Umi Fitriyanti, Feranda, Erma Wati, dll yang banyak memberikan nasihat. Serta Kak Ageng yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam proses penelitian.

10. Sahabat-sahabat ku, Nida Dwi Safitri, Eka Septiani Mutia, Siti Komariah, Veni Jayanti, Nani Afrillia, Ratna Sari, yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung, Seli Saraswati, Elsa Alandera, Agus Triawan, Nunung Monika, Retno Ayu Untari, Livia Cici Dahlia, Endah Pusfita, Rika, Ulul, Dewi, Ani, Tiara, Saadah, Sari, Uswatun, Imah, Pangestuti, Peni, Taufik, Amrullah, Yogya, Aldi, Iqsan, Hakim, Ghofar, Dila, Ayu, Gustin, Andini, Tia, Liska, Desti, Nimas, Sugeng, Iqbal, Habib, Oby, dll, yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.



**Bandar Lampung, 2019**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Riwayat Hidup .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xii</b>

<b>BAB I    Pendahuluan</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Kajian Pustaka .....	21

<b>BAB II   Strategi Pemberdayaan dan Disabilitas</b>	
A. Teori Feminisme Liberal.....	25
B. Strategi Pemberdayaan .....	28
1. Pelatihan .....	31
2. Advokasi .....	32
C. Disabilitas .....	39
1. Jenis-Jenis Disabilitas .....	40
2. Karakteristik penyandang disabilitas .....	42
3. Faktor-Faktor Penyebab Disabilitas .....	44
4. Hak-hak Penyandang Disabilitas .....	45
D. Strategi Pemberdayaan Wanita Disabilitas .....	47

<b>BAB III   Gambaran Umum Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas</b>	
A. Gambaran Umum HWDI .....	49
1. Sejarah Berdirinya HWDI .....	49
2. Struktur Lembaga HWDI .....	50

3. Visi dan Misi .....	52
4. Program Kerja .....	52
B. HWDI dalam Memberdayakan Wanita Disabilitas .....	53
<b>BAB IV Analisis Strategi Lembaga HWDI Dalam Pemberdayaan Bagi Wanita Disabilitas Berdasarkan pada Teori Feminisme.....</b>	
A. Strategi Advokasi HWDI dalam Mewujudkan Kesamaan Kesempatan dan Hak Bagi Wanita Disabilitas .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Program Kerja Lembaga DPP HWDI Periode 2012-2016.....	53
--	----





## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Kepengerusan Lembaga HWDI .....	50
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Interview
2. Panduan Observasi
3. Panduan Dokumentasi
4. Kepengurusan Lembaga DPP HWDI
5. Dokumentasi Berupa Foto
6. Kartu Hadir Munaqosa
7. Kartu Konsultasi
8. Surat Keterangan Judul Skripsi dan Penunjukan Pembimbing dari Dekan  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
9. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Surat Keterangan penelitian di Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas  
Indonesia

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah **Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Penyandang Disabilitas di Jakarta Pusat**. Penegasan judul ini bertujuan untuk menjelaskan batasan istilah dan variabel dari judul serta lingkup bahasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran judul yang diajukan oleh peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya adalah sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.<sup>1</sup> Menurut Griffin strategi merupakan suatu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai tujuan organisasi saja, akan tetapi strategi pula digunakan untuk mempertahankan eksistensi suatu lembaga dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>2</sup> Menurut Bintaro Tjokro Mijoyo dan Mustafat Jaya, strategi adalah keseluruhan langkah-langkah

---

<sup>1</sup> Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h.8.

<sup>2</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawn Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.132

dan rangkaian kebijakan guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi persoalan yang ada.<sup>3</sup>

Strategi yang penulis maksud adalah cara-cara yang dilakukan oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberdayakan wanita disabilitas guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberika<sup>1</sup> layanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<sup>4</sup> Yang dimaksud LSM disini adalah Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Jakarta Pusat yang merupakan sebuah lembaga nirlaba yang dijalankan oleh sekelompok wanita disabilitas, yang melakukan pemberdayaan terhadap wanita disabilitas.<sup>5</sup>

Pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ dalam bahasa Inggris yang berarti ‘daya’.<sup>6</sup> Pemberdayaaan dalam konteks disabilitas adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Bintaro Tjokro Mijoyo dan Mustafa Jaya, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), h. 13.

<sup>4</sup> Friska Mahardika, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman), h.32.

<sup>5</sup> Maulinia, “Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia”. (Tesis program Megister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2012), h.14.

<sup>6</sup> Edi Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung:Refika Aditama). h. 57.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (7).

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, yaitu ‘keberdayaan’ dan yang ‘dirugikan’, yang masing-masingnya perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).”<sup>8</sup> Disamping itu, terdapat lima bidang dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu penyediaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, peningkatan kapasitas pemerintahan nasional, pengembangan pasar yang pro-kemiskinan, dan pengembangan akses untuk bantuan keadilan dan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok wanita disabilitas yang tergabung dalam sebuah lembaga untuk menguatkan keberadaan wanita disabilitas dalam perspektif HAM, melalui pengembangan akses.

Disabilitas berasal dari kata ‘*disability*’ dalam bahasa Inggris, yang memiliki arti ketidakmampuan. *International Classification of Function* (ICF) mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara individu yang memiliki hambatan mental, fisik, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan lingkungan yang menyebabkan individu tersebut tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial.”<sup>10</sup> Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keadaan seseorang yang memiliki hambatan

---

<sup>8</sup> Jim Ife, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h. 130

<sup>9</sup> Syahyuti, *Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani*, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 25 No.2, Desember 2007, 107.

<sup>10</sup> Melina Margaretha, *et al*, *Disabilitas dalam Ketangguhan: Berangkat dari Sumberdaya yang Belum Termanfaatkan*, (German: Aktion Deutschland Hilft, 2015) h.7.

mental, fisik, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan lingkungan sehingga kesulitan dalam melakukan sebagian atau seluruh aktivitasnya.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini akan mengungkap tentang bagaimana rencana dan tindakan yang dilakukan oleh Lembaga DPP HWDI yang berdomisili di Jakarta Pusat untuk mewujudkan keadilan dan hukum dalam perspektif HAM, bagi wanita yang memiliki hambatan mental, fisik, maupun pengindraan secara permanen di Indonesia.

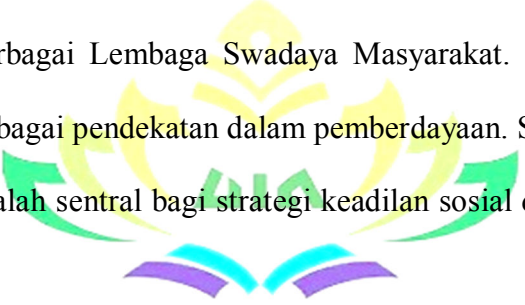
## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Menurut Women with Disabilities Australian (WWDA) kelompok wanita disabilitas adalah kaum yang lemah dalam memperoleh kesamaan kesempatan yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Karena kekuasaan terhadap hak-haknya yang lemah akibat dari kebijakan yang tidak memihaknya, sementara kebijakan dikuasai oleh pemerintah atau pemangku kebijakan, sehingga kelompok wanita disabilitas mulai berfikir siapa yang bisa merubah keadaan mereka, kelompok wanita disabilitaspun mulai memikirkan bagaimana cara agar mereka dapat mengklaim atas hak-haknya. Dengan demikian kelompok wanita disabilitas perlu adanya strategi pemberdayaan dengan pendekatan keadilan sosial dan HAM untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dan hak-haknya secara mandiri.
2. Lembaga HWDI, adalah lembaga yang berkiprah dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial wanita disabilitas, melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masa. Dalam

kiprahnya HWDI telah mampu menciptakan perubahan sosial bagi wanita disabilitas, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi wanita disabilitas dengan pemenuhan kesamaan kesempatan dan hak-hak bagi wanita disabilitas. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana strategi HWDI untuk pemenuhan kesamaan kesempatan dan hak-hak bagi wanita disabilitas.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, ide pokok pemberdayaan yang menitikberatkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak-hak asasi manusia (HAM) mulai digalakan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Bahkan HAM sendiri telah digunakan sebagai pendekatan dalam pemberdayaan. Sebagaimana “gagasan pemberdayaan adalah sentral bagi strategi keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM)”<sup>11</sup>



Berbicara mengenai HAM, tentulah “setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan suatu kebijakan.”<sup>12</sup> Sebagaimana pandangan terhadap hak asasi manusia sendiri merupakan pondasi bagi keadilan sosial dan perdamaian dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB bahwa HAM merupakan landasan kemerdekaan, keadilan dan kedamaian di dunia. Menurut

---

<sup>11</sup> Jim ife, Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.130.

<sup>12</sup> Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia),h.6.

pandangan ini, semua orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kebebasan yang setara.”<sup>13</sup>

Hak tersebut meliputi hak hidup, hak terbebas dari stigma negatif, hak bebas dari “diskriminasi”<sup>14</sup>, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak politik, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Dan pada hakekatnya Penyandang Disabilitas adalah makhluk sosial yang memiliki potensi, sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas terutama wanita dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.<sup>16</sup> Hal itu menuntut pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memainkan peran strategis tersebut.

Upaya pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi wanita disabilitas dilakukan oleh Indonesia dengan ikut andil dalam penyusunan serta pelaksanaan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *United Nation Convention on the Right of Person with Disabilities* (UNCRPD).<sup>17</sup> Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang

---

<sup>13</sup> Cucu Saidah, 2014, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas: Pelaksanaan Advokasi Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for justice), h.15.

<sup>14</sup> Diskriminasi adalah adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

<sup>15</sup> Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017, h.164.

<sup>16</sup> Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: PSHK, 2015) h.10.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.10.



mendasar bagi semua penyandang disabilitas sebagai dari bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>18</sup> Setelah Indonesia mengikuti konvensi tersebut, selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap UNCRPD. Pengesahan tersebut bermakna bahwa Indonesia secara resmi telah mengakui bahwa UNCRPD merupakan bagian dari kebijakan Nasional di Indonesia.”<sup>19</sup> Dan didalam kebijakan tersebut terdapat pasal yang secara khusus menegaskan tentang kewajiban negara untuk mewujudkan pemenuhan kesamaan kesempatan dan hak-hak bagi wanita disabilitas, yaitu pasal ke-6 yang berbunyi:

**“Penyandang Disabilitas Perempuan**

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara utuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana terdapat dalam Konvensi ini.”<sup>20</sup>

Melalui muatan-muatan yang terkandung di dalam UNCRPD pasal 6 tersebut, diharapkan wanita disabilitas memiliki keberdayaan, dan terbebas dari diskriminasi. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat kasus diskriminasi yang menimpa wanita disabilitas, dan bahkan di Jakarta kasus tersebut cenderung meningkat. Sebagaimana “data dari Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA), setiap tahun kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Jakarta meningkat: dimana tahun 2015 tercatat 29 orang

---

<sup>18</sup> Maulinia, Op.Cit, h.72.

<sup>19</sup> Arni Surwanti, et. all, 2016, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas*, (Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah), h.9.

<sup>20</sup> Naskah terjemahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, pasal 6

wanita disabilitas korban kekerasan baik kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi; ditahun 2016 kekerasan serupa meningkat menjadi 33 kasus dan 35 kasus di tahun 2017.”<sup>21</sup>

Beberapa contoh kasus diskriminasi terhadap wanita disabilitas tersebut adalah: *pertama*, “Kasus diskriminasi yang dialami oleh DA seorang aktivis disabilitas, yang gagal menghadiri undangan *International Disability Alliance* untuk turut serta dalam pelatihan pendalaman implementasi dan pemantauan konvensi tentang hak-hak disabilitas pada tanggal 4 hingga 11 April 2016 di kantor PBB, Swiss, ia dipaksa turun oleh kru maskapai penerbangan EA setelah berada di atas pesawat karena dianggap sakit.”<sup>22</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, tampak bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang mengakibatkan seorang wanita disabilitas kehilangan kesamaan sebagai warga negara yaitu tidak diperlakukan dan dilayani selayaknya warga negara lainnya oleh pihak maskapai penerbangan. Dan kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang aktivis disabilitas. Serta kehilangan haknya seperti: hak atas terbebas dari stigma negative, hak pelayanan publik, hak mobilisasi, hak migrasi, serta hak hidup secara mandiri dan terlibat dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Dina Fiti Anisa, *Kasus Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat*, (On-line) tersedia di: [https://www. Beritasatu.com/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat](https://www.Beritasatu.com/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat) diakses pada 26 Januari 2018.

<sup>22</sup> Harta Nining Wijaya, *Diskriminasi Maskapai Etihad Airways Terhadap Dwi Aryani*, tersedia On-line di: <https://www.solider.id/baca/4040-diskriminasi-maskapai-etihad-airways-terhadap-dwi-aryani>, diakses pada 7 Maret 2019.

*Kedua*, “pada tahun 2012 di panti sosial milik pemerintah daerah Jakarta Perempuan yang dianggap 'genit' dipasangkan alat kontrasepsi secara paksa.”<sup>23</sup> Hal tersebut merupakan tindakan yang merendahkan martabat wanita disabilitas, karena memasang alat kontrasepsi dengan paksa. *Ketiga*, kasus yang menimpa salah seorang siswi kelas 5 SD yang bernama Bunga (bukan nama sebenarnya) yang diperkosa oleh gurunya. Ketika mengajukan kasus tersebut kepada pihak berwajib setempat untuk mencari keadilan ia ditolak dengan alasan: laporan yang diajukan terlambat dan bukti-bukti yang dinilai tidak kuat; dan kesaksiannya tidak dapat dipercaya karena Bunga adalah anak yang lamban dalam belajar.<sup>24</sup> Dari kasus tersebut, korban telah mengalami bentuk diskriminasi ganda, selain diskriminasi sebagai wanita yang mengakibatkan luka psikis, juga memperoleh diskriminasi untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan keadilan hukum karena suara anak perempuan disabilitas tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan atas hak wanita disabilitas masih sangat minim.

Berbagai penelitian dilakukan untuk penyelesaian dari masalah wanita disabilitas, diantaranya: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Maulinia dalam tesisnya yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia”, yang mengkaji tentang modal sosial dan keberdayaan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas yang menjadi anggota Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. *Kedua*,

---

<sup>23</sup> Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, *Laporan Bayangan Indonesia: Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 2007, h.25.

<sup>24</sup> Eko Riyadi, ed , *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), h. 305.

Penelitian yang dilakukan oleh Asma Abdullah M. Al-Attiyah dan Elsayed Elshabrawy A. Hassanein, yang berjudul “*Women with Disabilities in the State of Qatar: Human Right, Challenges and Means of Empowerment*” yang mengkaji hak asasi manusia bagi wanita disabilitas Qatar, tantangan yang dihadapi oleh wanita disabilitas dan pria dengan atau tanpa disabilitas serta sarana pemberdayaan bagi penyandang disabilitas khususnya bagi wanita disabilitas. Serta penelitian ini menyarankan upaya pemberdayaan dengan pendekatan legislatif dan politik dianggap lebih strategis, karena memainkan peran sentral dalam mengubah sikap masyarakat terhadap wanita disabilitas daripada pemberdayaan sosial dan pendidikan.

Melihat dari saran penelitian yang dilakukan oleh Asma Abdullah M. Al-Attiyah dan Elsayed Elshabrawy A. Hassanein tersebut, terdapat berbagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang digerakan oleh wanita disabilitas yang berinisiasi untuk melakukan upaya untuk mempengaruhi pemangku kebijakan untuk melakukan tindakan pengimplementasian, pengesahan ataupun perubahan dari suatu kebijakan (advokasi) terkait wanita disabilitas. Sehingga wanita disabilitas memiliki posisi daya tawar yang sama dalam kebijakan maupun di lingkungan sosial, sebagaimana orang pada umumnya. Seperti “upaya advokasi bagi wanita dan anak dengan disabilitas untuk dapat mengakses layanan publik dan kebijakan inklusi yang dilakukan oleh Lembaga Sasana Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).”<sup>25</sup> Dan upaya lainnya yaitu pemberdayaan bagi wanita disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas

---

<sup>25</sup> Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, *Laporan Bayangan Indonesia: Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 2007, h.6.

Indonesia (HWDI). “HWDI merupakan organisasi sosial yang didirikan oleh 10 orang wanita disabilitas dan 5 orang ibu pemerhati disabilitas pada tanggal 9 September 1997. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI adalah memperjuangkan kesamaan kesempatan dan hak-hak wanita disabilitas melalui kegiatan pelatihan dan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan yang pernah dilakukan terkait hak kesejahteraan sosial bagi wanita disabilitas adalah advokasi pergantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.”<sup>26</sup>

Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh HWDI, memunculkan sebuah pertanyaan “Bagaimana strategi lembaga HWDI dalam memperjuangkan kesamaan kesempatan dan hak wanita disabilitas?, pertanyaan tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul skripsi “*Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Dalam Memberdayakan Wanita Penyandang Disabilitas di Jakarta Pusat*”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi pemberdayaan bagi wanita disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Jakarta Pusat?

#### **E. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan bagi wanita disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Dewan

---

<sup>26</sup> Walin Hartati, *Wawancara dengan penulis*, di kantor HWDI, Senin, 23 April 2018.

Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Jakarta Pusat.

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan:
  - a. Dapat memberikan kontribusi bagi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya di Universit Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas melalui kegiatan advokasi, dan
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan:
  - a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas, untuk lebih peduli terhadap masalah sosial terutama isu disabilitas, dan
  - b. Memberi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi peneliti, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan yang sifatnya ilmiah, diperlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal. “Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan suatu penelitian

dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.”<sup>27</sup> Secara umum, metode penelitian berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan atau menggambarkan variabel yang ada, semata-mata hanya untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa membuat suatu perbandingan dengan variabel yang lain. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci pengumpulan data.<sup>29</sup> *Penelitian kualitatif* adalah penelitian yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](#) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1993), h. 124.

<sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 3.

<sup>29</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

pembahasan hasil penelitian.<sup>30</sup>

Metode kualitatif ini dipilih oleh penulis karena tiga hal. Pertama, metode penelitian ini menekankan pada proses sehingga penulis memiliki peluang untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di lapangan. Kedua, pendekatan ini dapat meminimalisir kesenjangan komunikasi dengan subjek-subjek penelitian. Dan ketiga, pendekatan ini mampu memberikan fokus penelitian atau batasan penelitian.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi subjek yang akan diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, instrumen kunci dalam pengumpulan data adalah peneliti. Dan dalam pendekatan kualitatif, landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran umum pada latar belakang penelitian pembahasan hasil penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Setting lokasi penelitian ini adalah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tepatnya di Lembaga Dewan Perwakilan Pusat (DPP) HWDI yang beralamat di Menteng Square Office And Apartements, Tower A, Lantai Satu dan Dua, Unit AK 12 & AR 01 Jl. Matraman Raya No. 30E, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Lembaga tersebut memiliki karakteristik lembaga yang konsisten dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita disabilitas sejak berdirinya lembaga tersebut hingga saat ini. Dan lembaga

---

<sup>30</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *Penelitian Kualitatif*, (On-line), tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) diakses pada 05 Juli 2018.

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.329-330.



HWDI dalam mengupayakan pemenuhan kesamaan kesempatan dan hak bagi wanita disabilitas menarik untuk diteliti.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi dalam pencarian data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian.<sup>32</sup> Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball sampling*. *Snowball sampling*, merupakan metode pengambilan sampel yang pada mulanya berjumlah kecil, tetapi makin lama makin banyak dan pengambilan data baru berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis akan mencari subyek atau informan dari pengurus dan anggota lembaga HWDI yang dapat memberikan masukan dalam mengungkapkan bagaimana strategi lembaga himpunan wanita disabilitas Indonesia dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita disabilitas di Jakarta Pusat, dari informan tersebut penulis akan mencari informan lainnya dan seterusnya hingga data yang diperlukan telah diperoleh.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.<sup>34</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaarya, 2002), h.90.

<sup>33</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h 188

<sup>34</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aaplikasinya*, (Bogor:Ghalia Indonesia:2002) h. 82.

#### a. Observasi

Pengertian observasi adalah studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>35</sup> Menurut cara pelaksanaan dan tujuannya, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis atau observasi berstruktur.

Observasi berstruktur memiliki struktur dan kerangka yang jelas; didalamnya berisikan semua faktor yang diperlukan, dan sudah dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu. Seringkali observasi sistematis dibantu dengan alat-alat seperti: film, kamera foto, perekam suara dan lain sebagainya, dengan demikian akan Peneliti akan memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relative lebih singkat.<sup>36</sup>

Metode observasi berstruktur ini digunakan oleh penulis dalam memperoleh data atau informasi terkait dengan kondisi kedisabilitasan pengurus dan anggota, serta sarana dan prasarana yang ada di secretariat HWDI di Jakarta Pusat. Dimana observasi berstruktur ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kondisi dan keadaan sarana dan prasarana yang ada di tempat penelitian serta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI.

#### b. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau

---

<sup>35</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Mandar Maju, 1996) h.157.

<sup>36</sup> *Ibid*, h.165-166.

lebih berhadap-hadapan secara fisik atas topik tertentu.<sup>37</sup> Metode interview mencakup bagaimana cara yang dipergunakan seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang informan, dengan bercakap-cakap sambil berhadapan dengan informan tersebut.<sup>38</sup> Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis *interview bebas terpimpin* yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin.

Panduan digunakan dalam melaksanakan interview bebas terpimpin, pewawancara menggunakan panduan yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.<sup>39</sup> Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan strategi yang digunakan oleh lembaga HWDI sehingga dapat mewujudkan kesamaan kesempatan dan hak bagi wanita disabilitas.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang

---

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.171.

<sup>38</sup> Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Pt. Gramdia Pustaka, 1986), h. 22

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach* Cet. II, ( Bandung : Masdar Maju, 1996), h. 128.

berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>40</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan seperti: buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode bantu untuk menggali data tentang Lembaga HWDI, seperti struktur kepengurusan dan sejarah berdirinya HWDI, serta sejarah perkembangan HWDI.

#### 5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu metode pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara, dan waktu.<sup>42</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara berkala guna menghasilkan penelitian kualitatif yang bermakna, pengamatan tersebut dilakukan untuk menggali informasi dari subjek penelitian. Hasil analisis yang masih bersifat sementara akan dikonfirmasi dengan pencarian informasi terkait dari sumber yang berbeda.

#### 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian dapat

---

<sup>40</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.83.

<sup>41</sup> *Ibid.* h.236.

<sup>42</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group, 2010), h.256.

tercapai.<sup>43</sup> Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.<sup>44</sup>

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif dalam menganalisis data, Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>45</sup>

Setelah melakukan sebuah analisa data berupa interview, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkah selanjutnya ialah penafsiran pada data-data tersebut,

yang telah terkumpul demi terjabarkannya suatu data yang tersedia. Sedangkan tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan secara jelas, sistematis, logis, sesuai metode, dan universal. Sedangkan pola berfikir yang dilakukan dengan pola induktif, artinya sebuah pola dan fikir berdasarkan landasan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik dan banyak menerangkan fakta-fakta khusus itu menjadi sebuah pemecah dan penjelas

---

<sup>43</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*,( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104-105.

<sup>44</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.280.

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 248.

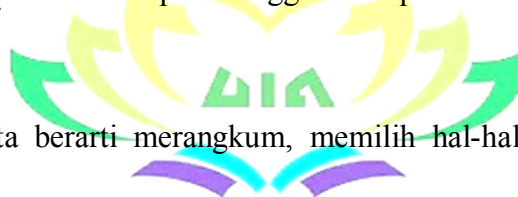
masalah yang umum dijabarkan.<sup>46</sup> Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

*a. Data Reduction ( Reduksi Data )*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit.

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

“Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.”<sup>47</sup>



Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

*b. Data Display ( Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and

---

<sup>46</sup> Moelox Laxi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999) h.3.

<sup>47</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h 199.

Huberman menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Teks naratif umumnya bertele-tele dalam penyajian informasi dan kurang mampu menyederhanakan informasi, sehingga penyajian naratif perlu dilengkapi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.<sup>48</sup> Penyajian data dalam penelitian kualitatif, merupakan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat (naratif), bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### *c. Conclusion Drawing/ Verification*

Tahap akhir dalam penelitian adalah *verifikasi* atau penarikan kesimpulan.

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung maupun menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan teori yang digunakan. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.<sup>49</sup> Atau dengan kata lain, proses verifikasi data merupakan suatu tahap pengkajian kesimpulan yang bersifat sementara berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, disamping mencari data yang sama atau diktif sebagai pendukung ataupun data yang kontradiktif yang menolak dari kesimpulan sementara tersebut.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h 200.

<sup>49</sup> Irawan Soehartono “ *Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.131.

## **G. Kajian Pustaka**

Penulis telah menelusuri beberapa literatur terdahulu untuk menjelaskan keorisinilan penelitian ini, dan temuan literature tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Tesis yang disusun oleh Maulinia, NPM: 09006655723, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2012. Tujuan umum dari tesis ini adalah “menggambarkan modal sosial dan pemberdayaan oleh Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia serta keberdayaan yang tercapai terhadap anggotanya”. Dan hasil dari penelitian ini adalah: (1) perempuan penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik dan non-fisik yang mengurangi keberdayaannya; (2) tipologi partisipasi HWPCI adalah ‘mobilisasi mandiri’ dimana perempuan penyandang disabilitas melakukan pemberdayaan secara mandiri tanpa ada pengaruh dari luar; (3) HWPCI melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perempuan penyandang disabilitas. Pemberdayaan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh anggota HWPCI sendiri. Perencanaan didasarkan kebutuhan, pelaksanaan dilaksanakan spesifik berdasarkan kecacatan, dan terdapat proses belajar dalam evaluasi; (4) HWPCI memberi modal sosial kepada perempuan penyandang disabilitas dengan memasukkan mereka ke dalam jaringan sosial sehingga memungkinkan perempuan penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan berpartisipasi; dan (5) pemberdayaan dan



modal sosial menciptakan keberdayaan pada perempuan penyandang disabilitas berupa kedua hal tersebut menciptakan keberdayaan pada perempuan penyandang disabilitas berupa terciptanya kepercayaan diri, kesempatan beraktivitas, akses untuk berpartisipasi, terciptanya kemandirian, dan adanya kesetaraan kesempatan.

2. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya, Jurnal “*Analisa*” Volume XVII, No. 11, Januari-Juni 2010 yang disusun oleh Zakiyah, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana perempuan diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan. Dengan menggunakan lima pendekatan yaitu: pendekatan kesejahteraan, kedua pendekatan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, ketiga pendekatan anti kemiskinan, keempat pendekatan efisiensi keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Kelima pendekatan pemberdayaan. Dan hasil dari penelitian ini adalah program-program yang dilakukan oleh organisasi Putri Al-Irsyad dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan agama. Diantara program tersebut ada yang bersifat jangka panjang dan juga yang bersifat *incidental*.
3. Asma Abdullah M. Al-Attayah dan Elsayed Elshabrawy A. Hassanein, yang berjudul “*Women with Disabilities in the State of Qatar: Human Right, Challenges and Means of Empowerment*” Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara Mahasiswa di Universitas Qatar dengan jenis kelamin pria dan wanita,

dengan atau tanpa menyandang disabilitas dalam hal: hak asasi manusia, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengakses HAM, dan apa saja pendekatan pemberdayaan yang dianggap tepat untuk memperoleh HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) hanya sebagian kecil dari wanita penyandang disabilitas yang menggunakan hak mereka di berbagai bidang, seperti hak penentuan nasib sendiri dan pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas; b) perempuan dengan disabilitas memiliki hambatan lebih banyak yang terkait dengan masyarakat (berupa stigma negatif) dibandingkan dengan diri mereka sendiri atau keluarganya, dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas; Dan d) upaya pemberdayaan yang utama ditujukan bagi wanita disabilitas dibandingkan dengan wanita pada umumnya dan pria dengan atau tanpa menyandang disabilitas. Serta penelitian ini menyarankan upaya pemberdayaan dengan pendekatan legislatif dan politik dianggap lebih strategis, karena memainkan peran sentral dalam mengubah sikap masyarakat terhadap wanita dan disabilitas daripada pemberdayaan sosial dan pendidikan.

Sejauh ini, dari pengamatan penulis terhadap penelitian terdahulu, bahwa belum ada yang mengkaji tentang penyediaan akses untuk kesamaan kesempatan dan pemenuhan Hak-hak bagi wanita disabilitas

melalui advokasi kebijakan, oleh karena itu penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.



## BAB II STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN DISABILITAS

### A. Teori Feminisme Liberal

Teori merupakan seperangkat proposisi yang berhubungan secara logis, yang menerangkan suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori feminisme liberal yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami teori feminisme liberal, penulis akan menjelaskan sejarah lahirnya teori feminisme secara singkat dan pengertian teori feminisme secara umum terlebih dahulu.

Berangkat dari paradikma radikal milik Twelvetrees dan analisis struktural radikal, yang melahirkan paham dan teori kritik pada tahun 30-an.<sup>50</sup> Teori kritik (*critical teori*) merupakan teori perubahan sosial atau transformasi sosial, yang melakukan kritik sosial terhadap ketidakadilan system yang dominan. Teori kritik secara radikal memiliki pandangan tentang kajian antara teori dan praktik. Bagi teori kritik, cita-cita akan keadilan sosial tidak akan terwujud jika tidak melibatkan kesadaran mereka yang tertindas untuk terlibat dalam aksi 'refleksi',<sup>51</sup> 'kritis',<sup>52 53</sup>

Menurut paham radikalisme masalah sosial merupakan situasi yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada dalam sistem yang *classist*, *sexist*, dan *Rasist* karena menciptakan ketidakadilan melalui perbedaan-perbedaan status sosial. Dan jika dibiarkan keadaan ini akan semakin memburuk, oleh karenanya aliran ini memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan perjuangan rakyat dalam memperoleh kekuasaan dan menjangkau sumber-sumber sistem ekonomi, sosial, dan politik melalui advokasi maupun aksi sosial dan politik dalam melakukan perubahan sosial.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Mansur Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.91.

<sup>51</sup> refleksi adalah renungan/pemikiran/pertimbangan

<sup>52</sup> kritis adalah tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian

<sup>53</sup> Mansur Fakhri, *Op.Cit*, h.93-94.

<sup>54</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h.197.

Teori kritis ini menjadi fondasi bagi berbagai pengembangan teori, diantaranya: teori marxisme, teori sosialis, dan teori feminisme.<sup>55</sup> Sedangkan Teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasikan, meliputi banyak hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman pada wanita yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita di dalam dua cara.<sup>56</sup> Pertama, titik tolak semua adalah situasi dan pengalaman-pengalaman wanita dalam masyarakat. Kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita. Teori feminisme sendiri terdiri dari beberapa aliran yaitu; feminisme penganut modernisasi (feminisme liberal), feminisme marxis dan feminis sosialis. Sementara itu, terdapat anti tesis dari teori ini yaitu teori Ekofeminisme.

Feminisme marxis berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi adanya ketimpangan gender di masyarakat. Sementara, feminisme sosialis berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Ekofeminisme, aliran ini cenderung menerima perbedaan laki-laki dan perempuan. Serta mempercayai bahwa faktor perbedaan gender bukan diakibatkan oleh faktor dikonstruksi sosial budaya saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri wanita sendiri atau faktor intrinsik.<sup>57</sup>

Asumsi dasar teori feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan dan equilitas (keadilan) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan dunia umum. Kerangka teori feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat melalui 'aksi sosial'<sup>58</sup>, yang tertuju pada

---

<sup>55</sup> Mansur Fakhri, *Op. Cit*, h.96.

<sup>56</sup> Jackson, Stevi dan Jackie Jones, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. (Yogyakarta : Jalasutra, 2009), h.335.

<sup>57</sup> Zulfikri, *Menelisik Sejarah Pendekatan Feminisme Dalam Islam*, tersedia On-line di: [https://www.academia.edu/30923703/PENDEKATAN\\_FEMINIS.pdf](https://www.academia.edu/30923703/PENDEKATAN_FEMINIS.pdf), diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019, pk. 10;46 WIB

<sup>58</sup> Aksi sosial (*sosial action*), menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya dalam hal pembuatan keputusan masyarakat.

kesempatan yang sama dan hak yang sama' bagi setiap 'individu', termasuk di dalamnya kesamaan kesempatan dan hak kaum wanita.<sup>59</sup>

Perjuangan paling kentara dari feminisme liberal adalah dalam mengusulkan amandemen kebijakan kesetaraan hak (*Equal Right Amandemen / ERA*) untuk mengintegrasikan wanita kedalam arus utama kehidupan melalui penghapusan Undang-undang dan tradisi-tradisi yang diskriminatif yang menghalangi wanita untuk memperoleh kesamaan penuh dalam konteks HAM.<sup>60</sup>

Hal-hal dan pertanyaan dalam perumusan masalah pada penelitian ini akan

dibahas dengan menggunakan teori feminisme liberal, dimana pemberdayaan dilakukan oleh sekelompok wanita disabilitas yang tergabung dalam sebuah lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dengan melakukan sebuah perubahan sosial melalui advokasi, yang bertujuan untuk pemenuhan "kesamaan kesempatan"<sup>61</sup> dan hak bagi wanita disabilitas.

## **B. Strategi Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>62</sup> Pemberdayaan (*empower*) mengandung dua arti, pertama adalah *to give power or authority to* dan yang kedua berarti *to give ability or enable*. Pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan 'otoritas'<sup>63</sup> kepihak lain, sedangkan pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi keberdayaan.<sup>64</sup>

Secara konseptual, pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Rappaport, pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara

---

<sup>59</sup> Mansur Fakhri, *Op.Cit*, h.166-167.

<sup>60</sup> Mansur Fakhri, *Op.Cit*, h. 205.

<sup>61</sup> Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

<sup>62</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*. h. 57.

<sup>63</sup> Otoritas adalah kekuasaan

<sup>64</sup> Priyono Onny S., & A.M. W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996), h.3.

psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.<sup>65</sup>

Setidaknya ada lima bidang yang dapat dijadikan objek dalam kegiatan

pemberdayaan, yaitu penyediaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas pemerintahan lokal atau pemerintahan nasional, pengembangan pasar yang pro-kemiskinan, dan pengembangan akses untuk bantuan keadilan dan hukum.<sup>66</sup> Pemberdayaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan oleh, untuk dan bersama wanita disabilitas dalam memberikan akses untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan haknya.

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok yang lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>67</sup> Pendapat yang berbeda mengungkapkan bahwa “Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, yaitu ‘keberdayaan’ dan yang ‘dirugikan’, yang masing-masingnya perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>68</sup>

Tujuan pemberdayaan tersebut dapat dicapai dengan sebuah strategi. “Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting dan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga.<sup>69</sup> Menurut

---

<sup>65</sup> Harry Hikmat, *Op.cit*, h.3.

<sup>66</sup> Syahyuti, *Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 25 No.2, Desember 2007, 107.

<sup>67</sup> Edi Suharto, 2010, *Op.Cit*, h.60.

<sup>68</sup> Jim Ife, Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h. 130

<sup>69</sup> Totok Mardiknto, Totok Mardiknto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.168.

Griffin strategi merupakan suatu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, strategi digunakan untuk mempertahankan eksistensi suatu lembaga dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>70</sup> Sebagai system, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>71</sup>

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan strategi-strategi berikut: Strategi *enabling* adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan dengan menempatkan pemerintah atau swasta sebagai *enabler* atau menjadi subyek dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dan program-program pemberdayaan; Strategi *empowering* adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan dengan menempatkan masyarakat dan pemerintah atau swasta pada posisi yang sejajar. Dimana masyarakat ditempatkan sebagai subyek dan terlibat aktif dalam proses formulasi dan ‘eksekusi’<sup>72</sup> kebijakan dan program pemberdayaan; dan Strategi *delegating* adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan dengan menempatkan peran masyarakat lebih dominan dan peran pemerintah atau swasta hanyalah sebagai fasilitator.<sup>73</sup>

Menurut Edi Soeharto, kegiatan pemberdayaan sering dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pelatihan dan advokasi.<sup>74</sup>

## **1. Pelatihan**

### **a. Pengertian Pelatihan**

Menurut Edwin B. Flippo pelatihan adalah proses membantu pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan yang digeluti sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan, fikiran dan tindakan, kecakapan,

---

<sup>70</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawn Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.132

<sup>71</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 168.

<sup>72</sup> Eksekusi adalah pelaksanaan surat wasiat

<sup>73</sup> Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet.1, h. 5.

<sup>74</sup> *Ibid*,h.103.



pengetahuan dan sikap.<sup>75</sup> Sementara, Edrew E. Sikula mengemukakan bahwa pelatihan (*training*) adalah suatu proses pendidikan dalam kurun waktu yang singkat dan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas.<sup>76</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu aktifitas pendidikan dalam mengembangkan wawasan, sikap ataupun kecakapan

dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat serta terorganisir.

#### b. Tujuan Pelatihan

Adapun tujuan umum dari pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional ;
- 2) Mengembangkan keterampilan/keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif;
- 3) Mengembangkan / merubah sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama anggota dan pimpinan.<sup>77</sup>

#### c. Metode Pelatihan

Menurut Bernadian dan Rusell menglompokkan metode-metode pelatihan atas dua kategori, yaitu *informational methods*, dan *experientak methods*.

- 1) *Informational Methods* menggunakan pendekatan satu arah, dimana informasi disampaikan oleh para pelatih (fasilitator) kepada para peserta (masyarakat atau wanita disabilitas).
- 2) *experiental methods* atau metode praktik, adalah metode yang mengutamakan komunikasi yang luwes, fleksibel dan lebih

---

<sup>75</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.164.

<sup>76</sup> A. Anwar Prabu Mmangkunegara, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* ( Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.51.

<sup>77</sup> Sedarmayanti, *Op.Cit*, h.170.

dinamis, baik dengan instruktur, dengan sesama peserta, dan langsung mempergunakan alat-alat yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dengan menggunakan pendekatan satu arah ataupun pendekatan praktik.

## **2. Advokasi**

### **a. Pengertian Advokasi**

Advokasi adalah praktek kerja sosial untuk meningkatkan klien dalam rangka menghadapi diri mereka dengan kehidupan sosial masyarakat.<sup>78</sup> Strategi advokasi sosial merupakan suatu pembelaan dan pendampingan terhadap hak-hak sosial (*sosial right*) masyarakat yang mengalami eksploitasi dan peminggiran oleh individu, kelompok, atau institusi yang menindas.<sup>79</sup> Advokasi dalam pergerakan disabilitas, merupakan serangkaian upaya yang mengarah pada adanya perubahan kebijakan pemerintah ataupun sikap masyarakat yang berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas yang lebih luas. Dan kegiatan advokasi tersebut dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas secara individu maupun kelompok.<sup>80</sup>

Advokasi kebijakan dalam penguatan posisi-tawar wanita disabilitas memerlukan dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat yakni pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan lain sebagainya.<sup>81</sup> Disamping itu, pengorganisasian masyarakat penting dilakukan untuk melakukan suatu perubahan guna memecahkan suatu masalah dan atau memperbaiki keadaan.

---

<sup>78</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: HUP, 2006), cet.ke-4, h.50.

<sup>79</sup> Edi Soeharto, *Op.Cit*, h.22.

<sup>80</sup> Cucu Saidah, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas: Pelaksanaan Advokasi Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: AIPJ, 2014), h.52.

<sup>81</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*. h. 129.

Dalam melakukan perubahan sosial seringkali tidak dapat dilakukan perorangan, melainkan membutuhkan dukungan dari pihak lain yaitu masyarakat.<sup>82</sup>

#### b. Tujuan Advokasi

Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi wanita disabilitas.<sup>83</sup> Advokasi dilakukan dengan melalui suatu analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal dari penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang disabilitas. Analisis tersebut harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan dan kemampuan internal organisasi, dan mengidentifikasi ancaman serta peluang dari lingkungan eksternal yang dapat mendukung maupun menghalangi upaya-upaya advokasi.<sup>84</sup>

#### c. Teknik Advokasi

Beberapa teknik advokasi yang dapat digunakan untuk mendidik atau mempengaruhi pihak lain yaitu penguatan kapasitas, sosialisasi, kampanye, lobby, dan demonstrasi. Sebagai suatu instrumen kebijakan, advokasi seringkali mengharuskan pemerintah untuk mendidik atau bekerjasama dan membangun koalisi dan lobby-lobby dengan kelompok-kelompok kepentingan.<sup>85</sup>

##### 1) Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas ini mencakup penguatan kapasitas individu, kelembagaan dan jejaring (*networking*) dengan lembaga lain dan interaksi dengan system yang lebih luas.<sup>86</sup>

- a) Penguatan kapasitas individu, adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik dalam lembaganya maupun dalam lingkup global, yang meliputi pengembangan kapasitas

---

<sup>82</sup> *Ibid.* h.128.

<sup>83</sup> Edi Soeharto, *Op.Cit.*, h.104.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h.56.

<sup>85</sup> Edi Suharto, *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.55.

<sup>86</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan public*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.69.

kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.

- b) Penguatan kapasitas entitas (kelembagaan), atau pengembangan mutu lembaga, diantaranya adalah: Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya; Interaksi antar individu dalam lembaga; dan Interaksi lembaga dengan pemangku kebijakan.
- c) Pengembangan kapasitas system (Jejaring), Pengembangan kapasitas jaringan ini penting untuk mencapai suatu tujuan lembaga, yang meliputi: a) Interaksi antara lembaga dalam system yang sama, seperti; b) organisasi kemasyarakatan, LSM, Lembaga publik dan lain sebagainya; dan c) Interaksi dengan lembaga diluar sistem, seperti; organisasi sosial politik, organisasi ekonomi, organisasi teknologi, organisasi pemerintah, dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

## 2) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan. Proses sosialisasi ini sangat penting, karena akan menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang dikomunikasikan tersebut.<sup>88</sup>

## 3) Kampanye

Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan direncanakan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi suatu tujuan yang spesifik dan terbatas. Kampanye dapat berarti kegiatan yang spesifik, berjangka pendek yang dapat diikuti dengan aktivitas yang lain, untuk mencapai perubahan jangka panjang.<sup>89</sup> Berkampanye berarti *menyuarakan, menarik perhatian masyarakat kepada, dan membangun kesadaran mengenai* suatu

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h.71-73.

<sup>88</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Op.Cit.* h.125.

<sup>89</sup> Cucu Sahadatilah, *Op.Cit.* h. 130, mengutip dari *Webster Illustrated Contemporary Dictionary-Encyclopedic Edition*, 1987, J.G. Ferguson Publishing Company

pokok persoalan penting, dan mengarahkan para pembuat keputusan untuk memberikan jalan keluar.<sup>90</sup>

#### 4) Lobby

Lobby adalah cara yang bisa ditempuh oleh organisasi masyarakat sipil untuk meminta wakil-wakil pemerintah agar bertanggung jawab dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas pada bidang-bidang tertentu.<sup>91</sup> Lobby adalah kegiatan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan atau pemerintah agar mengubah atau menjalankan kebijakan terkait dengan masalah yang dihadapi wanita disabilitas.<sup>92</sup>

#### 5) Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>93</sup> Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum.<sup>94</sup> Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas.<sup>95</sup>

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi sebagai suatu system, dalam hal ini, perencanaan dalam bentuk program kerja dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pelatihan, advokasi dan pengembangan jaringan untuk mencapai perubahan kebijakan terkait hak-hak wanita disabilitas. Yang dilakukan oleh wanita disabilitas sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai pemeran penunjang atau sebagai fasilitator.

#### d. Pelaku Advokasi (*supervisi*)

*Supervisi* atau pelaku kegiatan advokasi merupakan bentuk keberpihakan penyandang disabilitas terhadap semua golongan disabilitas untuk

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 130.

<sup>91</sup> *Ibid*, h.60.

<sup>92</sup> *Ibid*, h.53.

<sup>93</sup> Undang-undang, Nomor 9 Tahun 1999, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pasal 1.

<sup>94</sup> Wikipedia, *Unjuk Rasa*, tersedia On-line di [https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk\\_rasa](https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa), diakses pada 18 Juni 2019, pukul 10:27 WIB.

<sup>95</sup> *Ibdi*, pasal 9.

memperjuangkan hak yang setara antara dirinya dengan masyarakat, yang umumnya dilakukan dengan membentuk kelompok guna mencapai tujuan perubahan sosial.<sup>96</sup>

Seorang *supervisi* memiliki tanggung jawab untuk: membangun jaringan yang merupakan upaya untuk membangun hubungan komunikasi dengan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk berbagi informasi dan bekerjasama demi efektivitas; serta membangun koalisi yaitu membangun suatu jaringan yang menghubungkan individu-individu dan organisasi-organisasi secara erat lagi. Yang bersama-sama berada dalam satu system koordinasi untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan bersama, dimana setiap anggota tetap memiliki otonominya masing-masing.<sup>97</sup>

Secara garis besar, koalisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok yang terdiri dari satu atau lebih individu-individu, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam masyarakat penyandang disabilitas. Ketiga kelompok tersebut ialah:

- 1) Kelompok garis dasar yang berperan untuk membangun gerakan mengorganisir anggota masyarakat sipil. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran merupakan bagian penting dari proses sosialisasi dan mobilisasi. Sumbangan dari kelompok ini akan memperkuat tekanan sosial dan politik dari seluruh upaya advokasi, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- 2) Kelompok pendukung yang menyediakan sumber dana, dukungan logistik, pengumpulan data dan penelitian. Penelitian yang dilakukan demi tujuan advokasi hendaknya menekankan penerapan praktisnya. Demi upaya advokasi yang berfokus pada perubahan hukum atau perundangan, atau yang berusaha menuntut

---

<sup>96</sup> Cucu Saidah, h.54-55.

<sup>97</sup> *Ibid*, h.64.

pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah ditentukan oleh hukum atau perundangan lainnya yang sudah sesuai, kelompok ini juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian atas konteks legislatif dan serta memahami peraturan perundangan pada tingkat daerah dan nasional, yang dapat diterapkan pada pokok persoalan dari upaya advokasi ini.

- 3) Kelompok garis depan adalah para juru bicara dari upaya advokasi. Ini terdiri dari mereka yang ditetapkan sebagai juru bicara utama, juru runding, dan pelobi, serta mereka yang terlibat di dalam proses legislatif. Unit ini membangun dasar penggalangan sekutu.<sup>98</sup>

Kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki hubungan ‘hirarkis’<sup>99</sup> satu sama lain. Tak ada satupun kelompok yang “lebih tinggi” atau lebih penting daripada yang lain. Namun demikian, semua yang terlibat dalam kegiatan advokasi hendaknya memiliki kesepakatan bersama berkaitan dengan fungsi pada masing-masing kelompok.

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi sebagai suatu system, dalam hal ini, perencanaan dalam bentuk program kerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan advokasi untuk mencapai perubahan kebijakan terkait hak-hak wanita disabilitas. Yang dilakukan oleh wanita disabilitas sebagai pemeran utama dalam kegiatan advokasi dan pemerintah sebagai pemeran kedua atau sebagai fasilitator.

### C. Disabilitas

Terdapat paradigma *mainstream* terkait istilah disabilitas, yakni model biomedis, model sosial dan model biopsikososial. Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis atau *medical model of disability* yang dipengaruhi oleh Teori *Personal Tragedy* yang dipostulasikan oleh Barnes. Barnes memiliki tesis yang didalamnya mengatakan bahwa disabilitas adalah ketidakberuntungan individu karena kondisinya (disabilitas) tersebut merupakan hasil dari perbuatan tidak etis atau dosa, *taboo* atau bentuk sebuah

---

<sup>98</sup> *Ibid*, h.65-66.

<sup>99</sup> Hirarkis adalah berbentuk susunan organisasi atau kepangkatan

kutukan atau hukuman Tuhan.”<sup>100</sup> Sementara konsep disabilitas kontemporer dalam *Convention on the right of person with disability* adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi peran serta (partisipasi) mereka di dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis setuju dengan konsep disabilitas kontemporer yang menyatakan bahwa disabilitas adalah suatu kondisi seseorang yang mengalami hambatan fisik maupun mental dengan hambatan lingkungan sehingga dapat menghilangkan sebagian ataupun keseluruhan partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

## **1. Jenis-Jenis Disabilitas**

### **a. Disabilitas Fisik**

Penyandang Disabilitas Fisik ini meliputi beberapa macam, yaitu :

- 1) Kelainan Tubuh (disabilitas daksa). disabilitas daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh;
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (disabilitas netra). Disabilitas netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Disabilitas netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*totally blind*) dan *low vision*;
- 3) Kelainan Pendengaran (disabilitas rungu). Disabilitas rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran;
- 4) Kelainan Bicara (disabilitas wicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena kedisabilitasrunguan (disabilitas rungu-wicara), dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Nicola Golbran, Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang, (Indonesia: Australian AID, 2010), h. 29.

<sup>101</sup> Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium.2013), h.11.



## b. Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas mental ini terdiri dari :

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas;
- 2) Mental Rendah (disabilitas grahita). Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Dan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.<sup>102</sup>

## c. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda adalah orang yang menyandang disabilitas lebih dari satu, yaitu disabilitas fisik dan mental yang disandang oleh seseorang.<sup>103</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis disabilitas terbagi menjadi tiga yaitu: 1) Disabilitas fisik, atau keterbatasan yang dapat menghambat system kerja organ gerak atau pengindraan seseorang; 2) disabilitas mental, yang merupakan hambatan atau kelebihan pada intelektual. Yang terdiri dari mental tinggi, mental rendah, dan berkebutuhan khusus; dan 3) disabilitas ganda, dimana keadaan seseorang yang menyandang disabilitas lebih dari satu.

## 2. Karakteristik Disabilitas

### a. Karakteristik rungu wicara

Karakteristik rungu wicara, yaitu: Menarik diri dari lingkungan sosial atau membatasi pergaulan; sukar menyesuaikan diri pada situasi berfikir dan perasaan orang lain; bersikap ragu-ragu, merasa cemas jika

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>103</sup> *Ibid*, h.17.

berada dilingkungan yang baru; pola pikir terpaku pada hal-hal yang kongkret;  
cepat marah dan mudah tersinggung.<sup>104</sup>

b. Karakteristik Disabilitas Intelektual

Karakteristik Disabilitas Intelektual yaitu: tidak dapat mengurus diri, memelihara dan memimpin diri; cenderung bergaul dengan orang yang lebih muda darinya; tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum; kepribadian yang kurang dinamis dan tidak memiliki wawasan yang luas; mudah dipengaruhi oleh orang lain; memiliki ketekunan dan rasa empati terhadap seseorang yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.<sup>105</sup>

c. Karakteristik Disabilitas Mental

Karakteristik Disabilitas Mental yaitu: Memiliki kekacauan tingkah laku;  
sering merasa cemas dan menarik diri dari lingkungan sosial; kurang dewasa, dengan ciri-ciri; pelamun, kaku, suka berangan-angan dan tidak bisa mengurus diri; agresif dalam bersosialisasi; memiliki rasa cemas, gelisah, malu, dan rendah diri.<sup>106</sup>

d. Karakteristik Disabilitas Daksa

Karakteristik Disabilitas Daksa yaitu: Memiliki problem emosi, seperti, mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat

---

<sup>104</sup> Wardani, et. all., *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka 2008), h.5.18-5.21

<sup>105</sup> *Ibid*, h.6.19-6.20

<sup>106</sup> *Ibid*, h.7.30-7.31.

bergaul dan frustrasi; kurang memiliki rasa percaya diri dan sulit menyesuaikan diri.<sup>107</sup>

e. Karakteristik disabilitas netra

- 1) *Totally blind*; curiga pada orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain; gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel; suka mengulang-ulang gerakan tertentu atau perilaku stereotip (*stereotypic behavioral*).
- 2) *Low Vision*; selalu melihat dengan memfokuskan pada satu titik benda atau mengerutkan dahi, memiringkan kepala guna menyesuaikan cahaya (*sensitive terhadap cahaya*), sisa penglihatan yang dimiliki penyandang disabilitas *low vision* mampu mengikuti gerak benda. Apabila ada benda bergerak di depannya, ia akan mampu mengikuti arah gerak benda, hingga benda tersebut tidak tampak lagi.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik disabilitas antara yang satu dengan yang lain memiliki kekhususan masing-masing. Kekhususan tersebut penting diketahui oleh pelaku pemberdayaan guna memudahkan dalam proses pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam diri seorang penyandang disabilitas. Seorang pekerja sosial dapat memahami bagaimana cara untuk memandirikan penyandang disabilitas sesuai dengan derajat kedisabilitasannya. Oleh karenanya mengenal karakteristik penyandang disabilitas sangat penting sebelum menentukan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tersebut.

---

<sup>107</sup> *Ibid*,h.7.

<sup>108</sup> *Ibid*. h.4.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Disabilitas

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Disabilitas didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b. Disabilitas bawaan atau sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.<sup>109</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang mengalami kondisi disabilitas disebabkan oleh dua faktor, yang pertama karena bawaan sejak lahir dan yang kedua terjadi bukan sejak lahir atau terjadi saat setelah usia belia atau remaja atau dewasa atau lansia karena suatu kejadian (kecelakaan, perang, atau penyakit kronis) yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi disabilitas.

### 4. Hak Disabilitas

#### a. Pengertian Hak Disabilitas

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada pribadi seseorang karena orang tersebut adalah manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia termasuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Dalam dua dasawarsa terakhir, masyarakat penyandang disabilitas global telah berusaha untuk merubah paradigma terhadap penyandang disabilitas sebagai obyek kegiatan amal atau orang sakit yang membutuhkan kesembuhan menjadi subjek yang memiliki hak-hak dan mampu

---

<sup>109</sup> Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meratas Sekilas Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008) h.114.

mengklaim hak-haknya.<sup>110</sup>

Hak Disabilitas yaitu, setiap penyandang disabilitas berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari ‘eksploitasi’<sup>111</sup>, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas, yang meliputi hak:<sup>112</sup>

- 1) Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- 2) Mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Berdasarkan berbagai pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak disabilitas yaitu suatu yang melekat pada pribadi penyandang disabilitas, yang meliputi hak untuk mendapatkan penghormatan, hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, dan hak pelayanan sosial dalam rangka mewujudkan kemandirian.

#### b. Hak wanita disabilitas

Hak wanita disabilitas yang dicantumkan dalam suatu kebijakan atau Undang-undang merupakan suatu bentuk perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi wanita disabilitas, mengingat wanita disabilitas kerap mengalami perlakuan diskriminasi berlapis. Dimana diskriminasi berlapis merupakan bentuk diskriminasi yang dialami karena gender atau sebagai seorang wanita dan sebagai penyandang

---

<sup>110</sup> Cucu Saidah, *Op.Cit*, h.15.

<sup>111</sup> Eksploitasi dalam hal ini adalah pemerasan

<sup>112</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 26.

disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan. “Adapun hak khusus bagi wanita disabilitas, yaitu: hak atas kesehatan reproduksi; hak atas menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; hak atas perlindungan lebih dari tindak kekerasan; dan hak perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis.”<sup>113</sup>

a. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak wanita disabilitas

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak wanita disabilitas adalah:

- 1) Menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.<sup>114</sup>

#### **D. Strategi Pemberdayaan Wanita Disabilitas**

Pemberdayaan terhadap wanita disabilitas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat pada umumnya mengacu kepada kesejahteraan sosial dan keadilan. Mengingat wanita disabilitas kerap mengalami diskriminasi berlapis, sehingga memunculkan masalah ketidakadilan baginya, dan mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan haknya. Melihat dari masalah tersebut, penanganan masalah wanita disabilitas dapat dilakukan dengan pemberian akses kepada wanita disabilitas melalui kebijakan yang memihaknya. Dan untuk menjangkau ranah kebijakan tersebut diperlukan suatu rencana dan tindakan untuk mempengaruhi pemangku kebijakan agar membuat atau mengesahkan kebijakan terkait hak wanita disabilitas (advokasi).

Perencanaan kegiatan advokasi perlu memperhatikan dua faktor yaitu faktor internal atau faktor dari dalam wanita disabilitas sendiri dan faktor eksternal atau faktor dari luar wanita disabilitas. Perhatian pada faktor internal ini dilakukan

---

<sup>113</sup> *Ibid*, pasal 5 ayat 2.

<sup>114</sup> *Ibid*, pasal 125-127.

dengan menganalisis terhadap suatu kondisi dan isu-isu sosial terkait wanita disabilitas, atau dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh wanita disabilitas. Selanjutnya faktor eksternal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk membangun basis massa atau dukungan dari masyarakat dan kemampuan untuk mempengaruhi pemangku kebijakan, agar mau mengubah atau mengganti, mengesahkan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan.

Ketika kegiatan advokasi dilaksanakan oleh pelaku advokasi (*supervise*) dengan melakukan pengembangan kapasitas sistem, sosialisasi, dan loby. yang bertujuan untuk pemenuhan hak bagi wanita disabilitas. Dengan menempatkan wanita disabilitas sebagai subyek dari kegiatan tersebut, artinya wanita disabilitas berpartisipasi aktif sebagai pelaku dalam kegiatan advokasi tersebut.

Strategi pemberdayaan wanita disabilitas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah rencana yang dibangun dengan menempatkan peran wanita disabilitas lebih dominan dibandingkan pemerintah. Yang dilakukan melalui tindakan pengembangan sosialisasi, kapasitas sistem, dan loby, yang bertujuan untuk pemenuhan hak bagi wanita disabilitas, sehingga keberdayaan kaum wanita dalam perspektif keadilan sosial dan HAM dapat terwujud.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI) DAN PEMBERDAYAAN WANITA DISABILITAS

### A. Gambaran Umum HWDI

#### 1. Sejarah Berdirinya HWDI

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) didirikan, karena adanya kebutuhan bagi wanita penyandang disabilitas yang mengalami multi diskriminasi (sebagai wanita dan sebagai Penyandang disabilitas) dan sebagai dampak dari tuntutan global akan pemberdayaan wanita penyandang disabilitas.<sup>115</sup>

Tahun 1995 UN ESCAP mengadakan training Seminar *for Women With Disabilities* (WWD) di Bangkok, Thailand. Tahun 1997 di Washington DC USA diadakan pertemuan *Internasional Leadership Forum for WWD (Women with Disability)* yang dihadiri oleh 614 wanita disabilitas dari 82 negara di dunia. Setelah menghadiri *Internasional Leadership Forum* tersebut, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memfasilitasi pembentukan *womens komite* yang didukung oleh Departemen Sosial (Dep. Sos) RI, Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (UPW) dan *Nasional Sekretary of Rehabilitation Internasional* (NSRI). Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, 10 orang tokoh wanita disabilitas dan 5 orang ibu pemerhati masalah disabilitas berhasil membentuk formatur atau organisasi yang kemudian menyusun kepengurusan HWDI pada tanggal 9 September 1997 di gedung DNIKS. Saat itu, HWDI diketuai oleh

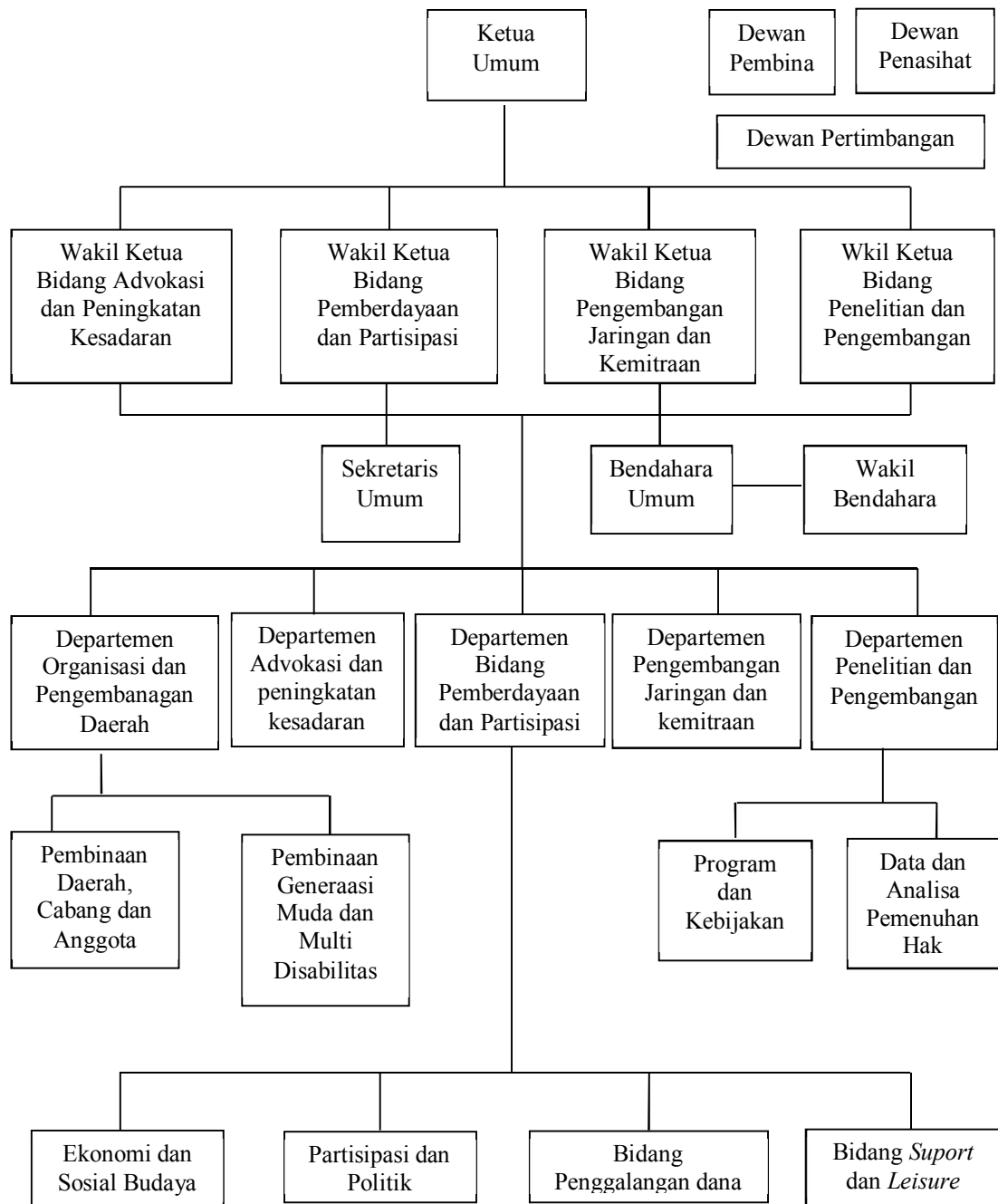
---

<sup>115</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018



## 2. Struktur Lembaga HWDI

**Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan Lembaga HWDI**



*Sumber: Profil HWDI*

<sup>116</sup> *Ibid.*

a. Kepengurusan

Kepengurusan Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) terdiri dari wanita penyandang disabilitas dari berbagai kedisabilitasan, baik fisik yang meliputi disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, disabilitas daksa; maupun disabilitas intelektual atau mental seperti mental tinggi atau (orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata). Dengan prinsip inklusi, kepengurusan HWDI terbuka untuk perempuan non disabilitas, asalkan tidak ditempatkan pada posisi inti maupun pelaksana harian, kehadirannya hanyalah sebagai pengganti disabilitas intelektual (mental rendah).<sup>117</sup>

b. Keanggotaan

Lembaga HWDI menganut system keanggotaan stelsel pasif, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap wanita disabilitas harus diberdayakan agar dapat hidup mandiri, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian secara otomatis “semua wanita disabilitas (fisik maupun mental) di Indonesia adalah anggota HWDI, tanpa terkecuali. Dan setiap anggota HWDI memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh HWDI. Keanggotaan pasif tersebut dapat berubah menjadi keanggotaan aktif apabila wanita disabilitas terlibat aktif sebagai pengurus di salah satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan atau Dewan Perwakilan Cabang (DPC) HWDI yang ada di Indonesia.”<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota HWDI terdiri dari dua bagian, yang pertama anggota aktif, yaitu wanita disabilitas yang terlibat

---

<sup>117</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran ke 1

<sup>118</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018

dan memanfaatkan kegiatan yang dilakukan HWDI, dan yang kedua anggota pasif, yaitu wanita disabilitas yang tidak terlibat dalam kegiatan HWDI, namun tetap merasakan hasil kegiatan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI, seperti penerapan kebijakan-kebijakan yang telah diadvokasi oleh HWDI yang berimplikasi pada diri mereka.

### **3. Visi dan Missi HWDI**

#### **a. Visi HWDI**

Visi HWDI ialah membentuk wanita Penyandang disabilitas yang mandiri, produktif dan mampu memberi manfaat.

#### **b. Misi HWDI**

Misi HWDI adalah sebagai berikut:

- 1) Memperjuangkan pembangunan sosial wanita penyandang cacat untuk mengangkat harkat dan martabatnya,
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wanita penyandang cacat,
- 3) Memperjuangkan kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh,
- 4) Meningkatkan kemitra sejajaran antara pria, wanita dan wanita penyandang cacat.<sup>119</sup>

### **4. Hakikat**

Lembaga HWDI merupakan organisasi wanita penyandang disabilitas yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan advokasi untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>120</sup>

### **5. Program Kerja**

Berikut ini merupakan program kerja terkait dengan kegiatan advokasi yang dilakukan oleh lembaga HWDI selama periode 2012 hingga 2016, dapat dilihat

---

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> Maulinia, Op.Cit, h. 47-48.

dalam tabel 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1. Program Kerja Lembaga HWDI Periode 2012-2016**

No	Program	Tahun	Target	Keterangan
1.	<i>Workshop</i> dan sosialisasi Hak-hak wanita disabilitas	2012-2014	Peserta memahami tentang: konsep disabilitas; Hak-hak Disabilit; dan Cara melakukan advokasi terkait hak-hak disabilitas	
2.	Advokasi Kebijakan	2012-2016	Pengesahan dan Pengimplementasian Undang-undang Disabilitas	Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat diganti dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3.	Program Kemitraan	2012-2016	Pengembangan jaringan ditingkat nasional dan internasional	

*Sumber: Buku Agenda HWDI*

## **B. HWDI dalam Memberdayakan Wanita Disabilitas**

Pemberdayaan dari, untuk dan bersama wanita disabilitas sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya merupakan suatu strategi dalam mengarahkan kelompok wanita disabilitas agar menjadi lebih baik. Strategi pemberdayaan dalam skripsi ini adalah strategi yang berbasis kesamaan kesempatan dan hak-hak wanita disabilitas yang sifatnya mendasar (*fundamental*), seperti hak untuk menentukan nasibnya sendiri, terbebas dari stigma negative, dan lain sebagainya. ‘Esensi’<sup>121</sup> strategi pemberdayaan sendiri adalah perencanaan dan tindakan (implementasi

---

<sup>121</sup> Esensi adalah intisari

dari suatu rencana) pemberdayaan. Dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan**

Perencanaan kegiatan dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada, proses penjaringan masalah tersebut dilaksanakan dalam forum musyawarah yang diketuai oleh Ketua Umum HWDI. Selanjutnya melalui musyawarah tersebut dipertimbangkan berbagai unsur pemberdayaan, diantaranya subyek atau pelaku pemberdaya, sasaran, teknik, dana, sarana dan prasarana serta media yang tersedia. Setelah itu, dilakukan sebuah analisis SWOT untuk menentukan program pemberdayaan yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan.

*Subyek atau pelaku* adalah pengurus dan anggota Lembaga HWDI, yaitu Ketua Bidang-bidang: Organisasi dan pengembangan daerah; Advokasi dan peningkatan kesadaran; Pemberdayaan dan partisipasi; Pengembangan jaringan kemitraan Nasional dan Internasional; serta Penelitian dan Pengembangan;<sup>122</sup> *Sasaran* pemberdayaan adalah kesamaan kesempatan dan hak-hak bagi wanita disabilitas. Strategi pemberdayaan yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah strategi advokasi, yang digunakan untuk mendidik masyarakat dan mempengaruhi pemangku kebijakan, dengan menggunakan *teknik* penguatan kapasitas, sosialisasi, dan lobby. *Dana operasional* Lembaga HWDI adalah hasil dari *Funding* kepada mitra maupun dari donator seperti individu, perusahaan, dan Organisasi sosial.<sup>123</sup> *Sarana dan prasarana* umum HWDI yang menunjang

---

<sup>122</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018

<sup>123</sup> Irdanely, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Kamis 13 September 2018

kegiatan pemberdayaan secara garis besar adalah sebagai berikut: Sarana yang dimiliki oleh HWDI yaitu Mobil pribadi, komputer, mesin printer-scan-foto copy, mesin print Braille; dan Prasarana yang dimiliki seperti: Ruang tamu, ruang pertemuan (*meeting room*), dan ruang kantor, yang dilengkapi dengan pendingin ruangan AC, Wifi, dan kamar mandi. Kemudian melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan lembaga untuk menentukan program pemberdayaan, dengan menggunakan pendekatan SWOT<sup>124</sup>

Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) melakukan analisis keadaan wanita disabilitas yang menyangkut potensi dan masalah, serta faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternal, hal ini dilakukan demi terwujudnya keberdayaan wanita disabilitas. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan "SWOT" yaitu gambaran yang mendalam tentang kekuatan (*strenght*) yang dimiliki HWDI adalah kemampuan dalam melakukan advokasi (*weakness*) yaitu berupa perlakuan diskriminasi burlapis yang kerap dialami wanita disabilitas, serta peluang (*opportunity*) untuk memperebutkan kekuasaan dalam ranah kebijakan publik dan tantangan (*treat*) meningkatkan kemampuan perempuan disabilitas dalam mengadvokasi hak – haknya. Pendekatan analisis SWOT tidak terlepas dari beberapa isu strategis yang akan diangkat yaitu: Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum termanfaatkan secara optimal, Partisipasi wanita disabilitas dalam kegiatan masyarakat, Kesehatan reproduksi wanita disabilitas, pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya wanita disabilitas dan

---

<sup>124</sup> Hasil Observasi lapangan, Kantor HWDI Pusat, Senin 10 September 2018.

Pemberdayaan wanita disabilitas.<sup>125</sup>

Berdasarkan isu strategis yang diangkat, maka ditetapkan sasaran utama, yaitu: Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) wanita disabilitas, meningkatnya partisipasi wanita disabilitas dalam kegiatan masyarakat, meningkatnya kesehatan reproduksi wanita disabilitas, dan Terpenuhi hak-hak bagi wanita disabilitas.<sup>126</sup>

Langkah selanjutnya adalah pengambilan kebijakan yang diputuskan dengan mengacu pada sasaran tersebut, adapun kebijakan yang ditetapkan adalah pelaksanaan advokasi dengan teknik sosialisasi hak-hak wanita disabilitas yang tertuang dalam CRPD, pengembangan kapasitas individu melalui *workshop* untuk meningkatkan mutu anggota dalam mengadvokasi hak-haknya dan pengembangan system (jaringan) untuk menciptakan relasi sosial dan membangun koalisi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, dan lobby untuk memberikan hak atas kesehatan reproduksi dan perlindungan dari diskriminasi ganda bagi wanita disabilitas.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan**

Berdasarkan dari kebijakan tersebut, dalam hal pemberdayaan bagi wanita disabilitas HWDI melaksanakan kegiatan advokasi dalam rangka untuk memperjuangkan pemenuhan hak bagi wanita disabilitas, dengan melakukan berbagai kegiatan berikut ini:

### **a. Sosialisasi dan *Workshop***

Kegiatan pemberdayaan wanita disabilitas melalui sosialisasi dan *workshop*

---

<sup>125</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018

<sup>126</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018

yang dilakukan oleh lembaga HWDI ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan arti dari konsep disabilitas dan hak-hak wanita disabilitas yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*) dan cara melakukan advokasi kebijakan untuk menuntut hak-hak wanita disabilitas yang tercantum dalam CRPD, apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Serta menyarankan wanita disabilitas untuk melakukan advokai terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait denga wanita disabilitas di Indonesia, kepada pemangku kebijakan. Tidak hanya menyarankan tetapi HWDI juga memberikan kesadaran dan motivasi kepada para anggotanya untuk terus meningkatkan pemenuhan akan kesamaan kesempatan dan hak-haknya dan mengikuti kegiatan loby. Sebagaimana ketua umum DPP HWDI dalam kegiatan tersebut menyampaikan: "...pergantian konsep cacat menjadi disabilitas, kemudian pengertian daripada konsep disabilitas; hak-hak bagi wanita disabilitas dalam CRPD yang harus dipenuhi oleh negara; dan memotivasi serta menghimbau kepada wanita disabilitas untuk melakukan advokasi apabila hak-haknya tidak terpenuhi..."<sup>127</sup>

Disamping itu, wakil ketua bidang advokasi dan peningkatan kesadaran juga "...melatih 'teman-teman'<sup>128</sup> dalam melakukan advokasi dengan menyampaikan tentang bagaimana cara untuk mengarahkan para pemangku kebijakan untuk mengubah Undang-undang penyandang cacat sudah tidak diimplementasikan dengan baik dan juga di dalamnya tidak ada pengaturan

---

<sup>127</sup> Maulani A. Rotinsulu, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 14 Oktober 2018.

<sup>128</sup> Teman-teman dalam lembaga HWDI merupakan istilah yang dipakai untuk menggantikan kata "kelompok wanita disabilitas" atau "sekumpulan dari individu wanita disabilitas".



tentang wanita disabilitas dengan Undang-undang yang baru yang sejalan dengan CRPD dan memuat tentang hak-hak wanita disabilitas, kemudian apabila Undang-undang tersebut telah disahkan kita harus memastikan Undang-undang tersebut dijalankan dengan baik...’’<sup>129</sup>

Kegiatan *Workshop* dan Sosialisasi akan hak-hak wanita disabilitas tersebut dilakukan oleh DPP HWDI untuk DPD HWDI di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Lampung dan Jawa Tengah, yang dihadiri oleh wanita disabilitas, baik fisik maupun mental sebagai peserta *workshop* dan sosialisasi. Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan lembaga DPD HWDI. Dengan adanya *workshop* dan sosialisasi tersebut, HWDI berharap wanita disabilitas mampu meningkatkan harkat dan martabatnya dengan memperoleh kesamaan kesempatan dan hak-hak yang sama sebagaimana orang pada umumnya.

#### b. Pengembangan Jaringan

HWDI membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai Instansi pemerintahan, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat serta lembaga penyandang dana untuk membuka akses terhadap pemenuhan hak bagi wanita disabilitas, sehingga keberdayaan wanita disabilitas dapat tercapai. Adapun jaringan kerjasama yang dibangun oleh HWDI dengan berbagai pihak baik antara anggota Lembaga HWDI maupun pihak dari luar Lembaga yaitu instansi pemerintahan atau swasta, lembaga sosial, dan media masa baik di dalam maupun diluar negeri, adalah sebagai berikut:

---

<sup>129</sup> Maulani A. Rotinsulu, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 14 Oktober 2018.

a) Jaringan antar Sesama Anggota HWDI

“Jaringan ini dibangun dengan menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antar sesama anggota. Rasa saling percaya antar anggota HWDI ini akan menimbulkan rasa kekeluargaan, hal ini penting untuk terus dipupuk dalam lembaga HWDI, mengingat dalam Lembaga HWDI terdapat berbagai wanita disabilitas dari berbagai jenis kedisabilitas. Dengan jaringan antar sesama HWDI ini, perbedaan tersebut tidak menjadi skat yang mengkotak-kotakan, melainkan menjadi pemersatu dan bahkan bisa untuk saling melengkapi.”<sup>130</sup>

b) Jaringan antara HWDI dengan Instansi Pemerintahan

“Jaringan ini dibangun dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti: Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bapenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”<sup>131</sup>

c) Jaringan antara HWDI dengan Instansi Swasta, Lembaga Sosial Masyarakat, Dan Media Masa

1) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

HWDI dalam melakukan berbagai upaya pemberdayaan wanita disabilitas bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pemberdayaan disabilitas maupun rehabilitasi atau biasa disebut dengan istilah

---

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> HWDI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, *Buku Praktis Memahami Penyandang Disabilitas dan Hak-haknya*, Jakarta, hal. h.18-19.

Organisasi Penyandang Disabilitas (ODP), seperti:

“Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN), Perhimpunan mandiri Kusta (PERMATA), Ikatan Tuna Rungu Muslim Indonesia (ITMI), Rehabilitas Berbasis Masyarakat (RBM), Gerakan Peduli Disabilitas dan Leprosy Indonesia (GPDLI), Yayasan Mitra Netra, Pusat Pemulihan Umum Akses untuk Disabilitas (PPUA), Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM), Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC), Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), PERSANI (*Charity Physical Disability Association*), Disabled Motorcycle Indonesia (DMI), Mitra Netra, Yayasan Sehat Jiwa Raga, Komunitas Sehat Jiwa (*Mental Healt Association*), *Bipolar Care Indonesia*, *D’Care Bandung Independent Living Center*, *Center of Improving of Qualified Activity in Life of Person With Disabilities* (CIQAL), dan lain sebagainya.”<sup>132,,</sup>

Kerjasama antar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pendanaan, advokasi dan Lembaga luar negeri juga dijalin oleh HWDI, yaitu: “Lembaga pendanaan: Organisasi Handicap Nusantara (OHANA), IB Foundation, Rio Tito Foundation, The Asia Foundation, Abilys Foundation, Handicap Internasioanl, dan lain-lain; Lembaga Advokasi: Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Yappika, Visi Anak Bangsa, Forum Parlemen Indonesia, Ikatan Advokasi Indonesia (IAI) DKI Jakarta, dan lain-lain; Lembaga Luar Negeri: *Spinal Cord Injury* (SCI), dan *Association of Mount and Foot Painting Actress* (AMFPA) , *Women International Club* (WIC), *Wemen With Disability Australia* (WWDA) dan lain-lain.”<sup>133</sup>

## 2) Perguruan Tinggi, Instansi Swasta, Perusahaan, dan Lembaga Bantuan Sosial;

Perguruan Tinggi, Instansi Swasta, Perusahaan, dan Lembaga Bantuan Sosial; “Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Pertamina, Soroptimis Internasional, Keluarga Huang Indonesia, WIC (*Women International Club*), Himpunan Keluarga Surabaya (HIKSA), Pengajian As-Sakinah, Yayasan

---

<sup>132</sup> Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, *Laporan bayangan CRPD Indonesia tahun 2017*, h.7-8.

<sup>133</sup> *Ibid.*

Teratai, Yayasan Harapan Keluarga, Yayasan Bina Mandiri dan lain sebagainya.”<sup>134</sup>

### 3) Media Masa

HWDI dalam melakukan berbagai upaya pemberdayaan wanita disabilitas bekerjasama dengan Majalah DIFFA (*Difabel Magazine*), Majalah Young Voice, Radio SIGAB, dan lain-lain.<sup>135</sup> Salah satu bentuk dukungan dari radio SIGAB terhadap kegiatan lobby yang dilakukan oleh HWDI dan Kelompok Kerja Undang-undang Disabilitas adalah menyiarkan secara langsung kegiatan diskusi publik penerapan prinsip-prinsip CRPD, sehingga dapat didengarkan oleh masyarakat umum maupun penyandang disabilitas, khususnya wanita disabilitas.<sup>136</sup>

#### c. Lobby

Suatu kebijakan yang ditujukan bagi wanita penyandang disabilitas akan efektif apabila dalam prosesnya melibatkan wanita disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, HWDI mewakili suara wanita disabilitas dalam menyampaikan pendapat, ide, ataupun gagasan, dan terlibat dalam proses mempengaruhi pemangku kebijakan untuk mengganti dan mengimplementasikan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan wanita disabilitas, terutama dalam aspek pemenuhan hak. Kegiatan tersebut dilakukan sejak tahun 2011, dimana HWDI bekerjasama

---

<sup>134</sup> Nila Krisdawati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018

<sup>135</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Jakarta, Senin 23 April 2018

<sup>136</sup> Dokumentasi video Diskusi Publik Penerapan Prinsip-Prinsip CRPD dalam RUU Penyandang Disabilitas

dengan berbagai pihak yang tergabung dalam “kelompok kerja Undang-undang Disabilitas”<sup>137</sup>.

Upaya HWDI tersebut, dapat dilihat dari: “Keterlibatan HWDI dalam perumusan draft Undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang dinilai tidak terimplementasi dengan baik dan di dalamnya tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah wanita disabilitas, padahal wanita disabilitas ini sering mengalami diskriminasi ganda. Sehingga kebijakan tersebut perlu diganti dengan Undang-undang yang baru. Draft undang-undang tersebut secara umum memuat tentang pemenuhan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, wanita disabilitas dan anak penyandang disabilitas.”<sup>138</sup>

Adapun proses pengusulan draft Undang-undang tersebut hingga disahkan menjadi Undang-undang adalah sebagai berikut:

1) Perumusan draft RUU (Rencana Undang-Undang)

“Tahun 2012 atau setelah pengesahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ‘ratifikasi’<sup>139</sup> CRPD, dilakukan perumusan draft RUU penyandang disabilitas oleh ‘tujuh orang senior’<sup>140</sup> HWDI. Ketujuh orang tersebut mewakili kelompok wanita disabilitas dalam mengupayakan

---

<sup>137</sup> Kelompok Kerja Undang-Undang Disabilitas (POKJA Undang-Undang Disabilitas) beranggotakan sekelompok organisasi yaitu Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

<sup>138</sup> Junaiti Effendi, wawancara dengan penulis, Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis 20 September 2019

<sup>139</sup> Ratifikasi adalah pengesahan atau pengakuan kebenaran oleh parlemen terhadap dokumen negara

<sup>140</sup> Maulani, Aryani, Walin, Junaiti, Irdanely, Yeni, Refi

pemenuhan hak bagi wanita disabilitas, bersama dengan beberapa penggiat di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) diantaranya ada Pak Fajri Nursyamsi, Pak Mahmud, dan Pak Bambang. Karena dalam proses perumusan itu banyak orang dari berbagai kalangan yang terlibat didalamnya jadi gak mudah untuk menyatukan pemikiran dalam suatu gagasan, hingga memakan waktu berbulan-bulan.”<sup>141</sup>

## 2) Pengusulan RUU kepada Yudikatif dan Legislatif

“Setelah RUU tersebut rampung, sebanyak 432 pasal, kemudian diserahkan kepada judikatif (badan penentuan hukum), kemudian oleh yudikatif 432 pasal tersebut disederhanakan menjadi 268 pasal. Kemudian diajukan ke “legislatif”<sup>142</sup> dan disederhanakan kembali menjadi 153 pasal. Disinilah RUU tersebut digodok menjadi Undang-undang, namun dalam prosesnya sempat terjadi ketidakpastian dalam pengesahan Undang-undang tersebut akibat pergantian jabatan Presiden RI (dari Presiden SBY menuju Presiden Joko Widodo). Oleh karena itu, HWDI bersama tim Kelompok Kerja Undang-undang Disabilitas mengambil langkah untuk mendesak pemangku kebijakan melalui kegiatan diskusi publik.”

## 3) Diskusi Publik

Diskusi Publik ini, bertujuan untuk memonitoring kegiatan regulasi (penggantian kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Disabilitas) yang sedang dilakukan dan mendesak pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan draft Undang-undang yang telah diajukan. “HWDI dan tim Kelompok Kerja menggelar sebuah agenda diskusi publik penerapan prinsip-prinsip

---

<sup>141</sup> Walin Hartati, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Senin 23 April 2018.

<sup>142</sup> Badan Legislative: lembaga perundang-undangan (DPR, Menteri, Presiden)

CRPD yang diadakan pada bulan April 2014 silam. Dalam diskusi publik tersebut dihadiri oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), perwakilan dari DPR, Penggiat Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta para aktifis yang peduli dan tertarik dengan isu disabilitas. Dalam diskusi tersebut para audien membahas kabar terbaru terkait sejauhmana perjalanan draft Rencana Undang-undang Penyandang Disabilitas yang telah diajukan oleh HWDI dan Kelompok Kerja Undang-undang Disabilitas, serta mendesak pemangku kebijakan (DPR) untuk menyegerakan pengesahan draft Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Dimana draft Rencana Undang-undang Penyandang Disabilitas ini sejalan dengan Konvensi CRPD, yang mencoba untuk menghapuskan unsur diskriminasi yang ada dalam kebijakan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997), yaitu diskriminasi pada penggunaan kata cacat, mengingat kata cacat merupakan identik dengan barang atau objek bukan subyek atau manusia yang memiliki hak, sehingga pengaturan baru yang memposisikan penyandang disabilitas terutama wanita disabilitas sebagai subyek yang memiliki hak diperlukan. Disamping itu, kebijakan tersebut tidak mengatur secara khusus akan hak-hak wanita disabilitas, sedangkan menurut *Women With Disabilities Australia* (WWDA) wanita disabilitas kerap mengalami diskriminasi ganda, yang menyebabkan kehilangan akan hak-haknya, oleh karena itu kebijakan yang dapat menaungi dan memenuhi hak-hak bagi wanita disabilitas sangat penting.<sup>143</sup> Dari kegiatan tersebut diharapkan kebijakan tentang penyandang disabilitas yang di dalamnya memuat hak-hak wanita

---

<sup>143</sup> Dokumentasi video Diskusi Publik Penerapan Prinsip-Prinsip CRPD dalam RUU Penyandang Disabilitas.

disabilitas dapat segera disahkan, sehingga penyandang disabilitas terutama wanita dapat diakui sebagai subjek yang memiliki hak.

Bulan April tahun 2016 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini disahkan. Adapun kebijakan yang mengupayakan pemenuhan hak-hak wanita disabilitas adalah: sebanyak 4 pasal, 1 ayat dan 4

huruf atau poin, dengan rincian sebagai berikut:

“Pasal 5, ayat 2, huruf a sampai d memuat tentang hak-hak wanita disabilitas, yaitu hak atas; 1) Kesehatan reproduksi, 2) Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, 3) Perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan 4) Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Pasal 125 hingga pasal 127 yang berisikan kewajiban negara, yaitu; 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindakan cepat untuk wanita dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap wanita dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk wanita dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.”<sup>144</sup>

Kebijakan tersebut kini dapat dinikmati oleh seluruh wanita disabilitas di Indonesia. Pengimplementasian kebijakan tersebut merupakan trobosan besar dalam merubah paradigma belas kasihan (*carity based*) menjadi subjek yang memiliki hak (*human right based*) bagi wanita disabilitas dan juga penyandang disabilitas pada umumnya. Oleh karenanya HWDI terus mengawal pengimplementasian kebijakan tersebut, sebagaimana penuturan informan berikut ini: “kegiatan advokasi pengimplementasian itu rutin dilakukan, biasanya ini

---

<sup>144</sup> Selengkapnya lihat Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5. ayat2. sebanyak 4 point; bagian kedelapanbelas, pasal 125-127.



terjadi setelah pergantian aparatur negara, seperti pergantian menteri sosial, menteri kesehatan, atau yang lainnya. Jadi, kita mengadakan pemantauan terhadap pengimplementasian kebijakan itu ya. dan kita akan melakukan advokasi setelah mendapat laporan dari “teman-teman”<sup>145</sup> tentang pelalaian atau pelanggaran terhadap kebijakan yang dilakukan oleh aparatur negara (pemangku kebijakan). Karena kebanyakan dari mereka belum paham dengan tugasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas tersebut, oleh karena itu HWDI melakukan runding kepada eksekutor...”<sup>146</sup>

Kegiatan runding tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas terutama wanita agar dapat memperoleh haknya dengan mengadvokasi pengimplementasian kebijakan kepada pemangku kebijakan atau “eksekutor”<sup>147</sup>. Setelah undang-undang tersebut diimplementasikan barulah pergeseran paradigma itu tampak nyata dan tidak hanya sekedar wacana. Dan kegiatan lembaga HWDI selanjutnya merupakan strategi untuk pengembangan kegiatan pemberdayaan maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas serta berkelanjutan.

---

<sup>145</sup> Teman-teman merupakan istilah yang dipakai di lembaga HWDI untuk menyebutkan sekumpulan atau sekelompok wanita disabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud teman-teman adalah pengurus bidang penelitian dan pengembangan.

<sup>146</sup> Nila, wawancara dengan penulis, Kantor HWDI, Selasa 10 September 2018.

<sup>147</sup> Eksekutor adalah Pelaksana kebijakan atau Undnag-undang.

## **BAB IV**

### **STRATEGI LEMBAGA HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI) DALAM PEMBERDAYAAN WANITA DISABILITAS**

Pemberdayaan wanita disabilitas merupakan serangkaian upaya untuk memerdekakan wanita dari berbagai bentuk diskriminasi baik dalam konstruksi sosial maupun gender yang bergerak dalam seluruh bidang, yang dilakukan oleh pihak yang memberdayakan (Lembaga) dengan mengembangkan akses bagi pihak yang dierdayakan (wanita disabilitas) agar mampu memperoleh kesamaan kesempatan dan hak-haknya. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan kaum wanita dalam perspektif keadilan sosial dan HAM.

Salah satu lembaga yang berupaya untuk meningkatkan keberdayaan kaum wanita dalam perspektif keadilan sosial dan HAM yaitu lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Lembaga HWDI menjadi agen perubahan yaitu sebagai *supervise* atau pelaksana advokasi, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan hak wanita disabilitas di Indonesia yang merupakan anggotanya. Sebagaimana telah disampaikan pada BAB III bahwa HWDI menganut sistem keanggotaan stelsel pasif, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap wanita disabilitas harus diberdayakan agar dapat hidup mandiri, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian secara otomatis “semua wanita disabilitas (fisik maupun mental) di Indonesia adalah anggota HWDI, tanpa terkecuali. Dan setiap anggota HWDI memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh HWDI.

Tujuan pemberdayaan HWDI tersebut dicapai dengan menggunakan strategi. Berdasarkan deskripsi dari data yang disajikan pada BAB III, strategi *delegating* merupakan strategi yang digunakan oleh lembaga HWDI. Hal tersebut tampak pada peran lembaga HWDI sebagai pelopor pemberdayaan, dimana lembaga HWDI memberikan akses bagi wanita disabilitas untuk memperjuangkan haknya sebagai penyandang disabilitas melalui tindakan pelatihan dan advokasi, dan disamping itu, peran lembaga HWDI lebih dominan dibandingkan dengan peran pemerintah. Sebagaimana bunyi dari strategi *delegating* sendiri yaitu “suatu usaha untuk melakukan perubahan dengan menempatkan peran masyarakat lebih dominan dan peran pemerintah atau swasta hanyalah sebagai fasilitator”.

Berdasarkan deskripsi dari data yang telah disajikan pada BAB III mengenai strategi lembaga HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas di Indonesia (anggotanya), maka penulis memberikan analisis tentang strategi pemberdayaan dalam penelitian ini sesuai dengan teori feminisme liberal yang telah diuraikan pada BAB II, dimana tujuan pemberdayaan dilakukan untuk memperjuangkan hak wanita disabilitas, dan pemberdayaan dilakukan dengan mengusulkan amandemen kebijakan untuk mengintegrasikan wanita kedalam arus utama kehidupan melalui penggantian Undang-undang dan tradisi-tradisi yang diskriminatif yang menghalangi wanita untuk memperoleh kesamaan penuh dalam konteks HAM.

Adapun proses pengusulan amandemen kebijakan tersebut dirumuskan dalam program kerja lembaga HWDI selama periode 2012 hingga 2016

sebagaimana penulis sajikan pada BAB III. Program kerja tersebut disusun guna memberikan gambaran atas kegiatan yang harus dilakukan serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga program kerja tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan bagi pengurus HWDI dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan lembaga. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga HWDI dilakukan melalui tindakan-tindakan sosialisasi, pengembangan kapasitas, dan lobby.

Aspek penting yang terdapat dalam pemberdayaan adalah strategi *enabling*, *empowering*, dan *delegating*. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan dalam teori pada BAB II dan dideskripsikan pada BAB III, tentang pemenuhan hak-hak bagi wanita disabilitas. Dalam hal ini, strategi *delegating* digunakan oleh lembaga HWDI, hal tersebut tampak pada peran utama dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah HWDI. Dimana HWDI berperan sebagai *supervise* dan pemerintah sebagai fasilitator.

Tindakan yang dilakukan oleh HWDI sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, sebagaimana telah disampaikan pada BAB II yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wanita disabilitas akan hak-hak wanita disabilitas dan upaya advokasi untuk menuntut hak-hak tersebut, pada kegiatan *workshop* dan sosialisasi yang diadakan di 5 provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi, Lampung dan Jawa Tengah. Dengan adanya sosialisasi tersebut wanita disabilitas dapat meningkatkan harkat dan martabatnya dengan memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana orang pada umumnya, sebagaimana telah diuraikan pada BAB III.

Tindakan selanjutnya merupakan lobby yang dilakukan HWDI dalam memperjuangkan hak-hak wanita disabilitas dilakukan dengan pengemasan hak-hak wanita disabilitas dalam draft peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi wanita disabilitas untuk mengklaim hak-haknya dan mengajukannya untuk menggantikan posisi undang-undang yang tidak berpihak kepada wanita disabilitas yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 1997, sebagaimana telah diungkapkan pada bab III. Dalam proses selanjutnya draft tersebut diamanatkan kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti, sehingga menghasilkan sebuah Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kegiatan lobby ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa lobby adalah kegiatan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan pemerintah agar mengubah atau menjalankan kebijakan terkait dengan masalah yang dihadapi wanita disabilitas. Dan hak wanita disabilitas yang dicantumkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi wanita disabilitas, mengingat wanita disabilitas kerap mengalami perlakuan diskriminasi berlapis. Dimana diskriminasi berlapis merupakan bentuk diskriminasi yang dialami karena gender atau sebagai seorang wanita dan sebagai penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Kebijakan tersebut merupakan payung hukum bagi wanita disabilitas yang dapat menaungi wanita disabilitas dari berbagai bentuk diskriminasi, mengingat kasus diskriminasi ganda kerap dialami oleh wanita disabilitas. Oleh karena itu,

selain melakukan kegiatan mempengaruhi pemangku kebijakan untuk mengganti Undang-undang tersebut, HWDI juga mengawal pengimplementasiannya guna memberikan hak-hak yang semestinya diterima oleh wanita disabilitas dan melakukan tindakan untuk mengembangkan kapasitas system atau jaringan lembaga HWDI. Pengembangan kapasitas system (Jejaring) merupakan sesuatu hal yang penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pengembangan kapasitas system atau jaringan ini sebagaimana telah diuraikan pada BAB III bahwa jaringan dalam lembaga ini dijamin dan dikembangkan antar sesama pengurus dan anggota, sementara pengembangan jaringan diluar lembaga ini dijamin dan dikembangkan antara HWDI dan pihak dari berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas (ODP), Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak Swasta, pihak pemerintahan, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Penyandang Dana (OPD), pihak media dan lain sebagainya.

Pengembangan kapasitas jaringan ini penting untuk mencapai pemberdayaan bagi wanita disabilitas dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sebagaimana terdapat pada BAB II bahwa Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan wanita disabilitas. Dan pengembangan jaringan antar individu maupun pengembangan kapasitas sistem jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, dan lembaga dalam memahami dan melaksanakan pemberdayaan dalam arti luas secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat kita cermati bersama bahwa strategi yang digunakan oleh lembaga HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas di

Indonesia (anggotanya) sesuai dengan teori feminisme liberal sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II, dimana strategi HWDI yang dirumuskan dan dilaksanakan melalui tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan kebijakan dan sikap serta paradigma masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan dan menegakan hak wanita disabilitas. Disamping itu, jika ditinjau secara konseptual, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga HWDI melalui dua strategi, yaitu pelatihan dan advokasi. Hal ini sesuai dengan konsep strategi pemberdayaan yang digagas oleh Edi Suharto.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis memaparkan dan melakukan analisa terhadap temuan penelitian dalam skripsi ini, yang berjudul “Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Memberdayakan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat”, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas di Indonesia (anggotanya), sebagaimana uraian singkat berikut ini:

1. Kegiatan Sosialisasi dan workshop, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan keahlian bagi wanita disabilitas dalam memperoleh hak-haknya yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dengan memberikan materi dan praktik dalam proses pelatihan advokasi bagi wanita disabilitas atau anggota HWDI yang berada di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Lampung dan Jawa Tengah.
2. Kegiatan Pengembangan sysem atau jaringan, yang bertujuan untuk membuka akses terhadap sumber dan memperluas kesamaan hak bagi peningkatan keberdayaan wanita disabilitas, yang dilakukan dengan mengembangkan jaringan di dalam lembaga HWDI serta membangun jaringan di luar lembaga HWDI, yaitu jaringan antara HWDI dengan berbagai Instansi pemerintahan, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyandang dana, dan media masa untuk membuka



akses terhadap sumber dan memperluas pemenuhan dan peningkatan keberdayaan wanita disabilitas dalam memperoleh haknya.

3. Kegiatan Lobby, yang bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi wanita disabilitas, sehingga wanita disabilitas dapat memperoleh hak-haknya dan perlindungan lebih dari tindakan diskriminasi. Yang dilakukan oleh HWDI dengan mencantumkan hak-hak wanita dsbilitas kedalam Rencana Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas, kemudian mengarahkan pemangku kebijakan agar mengesahkan draft undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang resmi dalam menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang penyandang cacat, serta mengimplementasikan kebijakan terkait dengan hak-hak wanita disabilitas.

## **B. SARAN**

Beberapa saran dari peneliti yang dapat memberikan kontribusi terhadap Lembaga HWDI, terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Lembaga HWDI: Lembaga HWDI perlu mempertahankan strategi yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan kesadaran pemerintah terkait dengan isu wanita disabilitas.
2. Saran untuk Pemerintah: Pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau eksekutor perlu mengupayakan pengimplementasian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas, guna pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya wanita disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 hingga pasal 127

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2014. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Arni Surwanti, et. all. 2016. *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Bintaro Tjokro Mijoyo dan Mustafa Jaya. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Cucu Saidah. 2014. *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas: Pelaksanaan Advokasi Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for justice
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Eko Riyadi, ed. 2012. *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawn Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Fajri Nursyamsi. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK
- Harry Hikmat. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: HUP

Irawan Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Jackson, dkk. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta : Jalasutra

Jim Ife, Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kartini Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju

Koetjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka

Lexy J. Moloeng. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaarya

M. Iqbal Hasan. 2002 *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia

Mansur Fakih. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Melina Margaretha, *et al.* 2015. *Disabilitas dalam Ketangguhan: Berangkat dari Sumberdaya yang Belum Termanfaatkan*. German: Aktion Deutschland Hilft

Moelox Laxi. 1999. *Metodologi Pwnwlitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung

Nicola Golbran. 2010. *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*. Jakarta: Australian AID

Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium

P.Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Pipih Sopiah. 1993. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia UGM

Prijono Onny S., & A.M. W. Pranaka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies

Sapto Nugroho, Risnawati Utami. 2008. *Meratas Sekilas Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta

Sedarmayanti. 2013 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Setiawan Hari Purnomo. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Purnanda Media Group

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sunyoto Usman. 2015. *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta

Wardani,et.all. 2008. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka

Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017

Friska Mahardika, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman

Maulinia, “Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia”. (Tesis program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2012

Syahyuti, *Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani*, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 25 No.2, Desember 2007

Majelis Umum PBB. 2006. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, *Laporan Bayangan Indonesia: Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 2007

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Dina Fitri Anisa, *Kasus Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat*, (On-line) tersedia di: [https://www. Beritasatu.com/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat](https://www.Beritasatu.com/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat)

**Harta Nining Wijaya**, *Diskriminasi Maskapai Etihad Airways Terhadap Dwi Aryani*, tersedia On-line di: <https://www.solider.id/baca/4040-diskriminasi-maskapai-etihad-airways-terhadap-dwi-aryani>

Wikipedia bahasa Indonesia, *Penelitian Kualitatif*, (On-line), tersedia di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

Wikipedia, *Unjuk Rasa*, tersedia On-line di [https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk\\_rasa](https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa),

Zulfikri, *Menelisik Sejarah Pendekatan Feminisme Dalam Islam*, tersedia On-line di: [https://www.academia.edu/30923703/PENDEKATAN\\_FEMINIS.pdf](https://www.academia.edu/30923703/PENDEKATAN_FEMINIS.pdf), diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019. pkl. 10;46 WIB

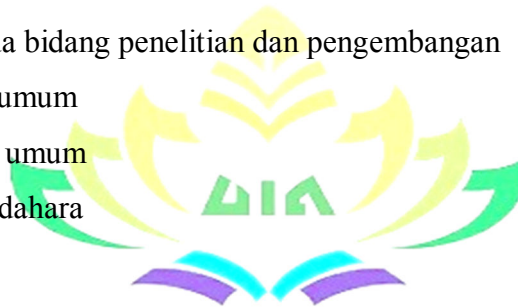


*Lampiran ke 1*

**Kepengurusan Lembaga DPP HWDI di Jakarta Pusat**

**A. Kepengurusan Inti**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Ketua umum   | Maulani A. Rotinsulu, |
| BA  |                       |
| 2. Wakil ketua bidang advokasi dan peningkatan kesadaran  | Dr. Junaiti Efendi    |
| 3. Wakil ketua bidang pemberdayaan dan partisipasi        | Rina Prasarani        |
| Alamsyah  |                       |
| 4. Wakil ketua bidang pengembangan jaringan dan kemitraan | Dra. Mimi Maryani     |
|   | Lusi, MA. MSc         |
| 5. Wakil ketua bidang penelitian dan pengembangan         | Aria Indarwati, SH    |
| 6. Sekertaris umum  | Walin Hartati         |
| 7. Bendahara umum   | Irdanelly, SE         |
| 8. Wakil Bendahara  | Lindawati, SE         |



**B. Dewan-Dewan**

1. Dewan Pembina
  - a. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indonesia
  - b. Menteri Sosial Rakyat Indonesia
  - c. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Rakyat Indonesia
  - d. Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
2. Dewan Penasehat
  - a. Bapak M. Bob Hasan
  - b. Ibu RA Aryanto
3. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Dra. Ariani Soekanwo
Anggota	: Dr. Asvi Retty
	Dra. Heny Santoso, AK

C. Departemen-departemen dalam Kepengurusan Lembaga HWDI

1. Bidang organisasi dan pengembangan daerah
  - a. Pembinaan daerah, cabag dan anggota  
Koordinator : Vera Herawati  
Anggota : Sri Barwati, SPd
  - b. Pembinaan generasi muda dan multi disabilitas  
Koordinator : Yenni Rosa  
Anggota : Dian Inggrawati
2. Bidang advokasi dan peningkatan kesadaran  
Koordinator : Maharetta Maha, SH  
Anggota : Bernadetta Aristyawati, SPd
3. Bidangn pemberdayaan dan partisipasi
  - a. Ekonomi dan sosial budaya  
Koordinator : Ininda Isman  
Anggota : Fridayani, SE, S.KOM, MM
  - b. Partisipasi dan politik  
Koordinator : Trias Budiastuti  
Anggota : Aryani Arsyad
  - c. Penggalangan dana: Atty Santika
  - d. Sport dan leisure  
Koordinator : Retnowati Sibarani  
Anggota : Dewi Susanti
4. Bidang pengembangan jaringan dan kemitraan Nasional / International  
Koordinator : Inda Endaliani  
Anggota : Nila Krisnawati
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Program dan kebijakan



Koordinator : Dra. Huldaria Bako

Anggota : Elva Sulistyawati

b. Data dan Analisa pemenuhan hak

Koordinator : Angela Friska Timothy

Anggota : Ellyana Rospita Sitio

*Sumber: Buku Agenda Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia tahun 2016*



## **PANDUAN INTERVIEW**

### **A. Identifikasi Informan:**

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan / Jabatan :
4. Jenis Disabilitas yang disandang :

### **B. Panduan Wawancara**

1. Bagaimana awal mula berdirinya Lembaga HWDI?
2. Apa saja kebutuhan bagi wanita disabilitas?
3. Bagaimana keadaan sumber daya Lembaga HWDI?
4. Apa saja masalah-masalah yang terjadi?
5. Apa saja solusi yang sudah atau akan dilakukan?
6. Mengapa memilih advokasi sebagai kegiatan untuk menyelesaikan masalah wanita disabilitas?
7. Bagaimana cara merancang keputusan dalam memilih advokasi sebagai kegiatan untuk menyelesaikan masalah wanita disabilitas?
8. Siapa yang menjadi pelaku advokasi tersebut?
9. Kapan kegiatan advokasi tersebut dilakukan?
10. Adakah instansi maupun lembaga yang menjadi mitra HWDI dalam melakukan advokasi?
11. Bagaimana pembagian peran antara HWDI dan mitra dalam advokasi tersebut?
12. Apa peran pemerintahan pusat ataupun daerah dalam program tersebut?
13. Bagaimana persiapan-persiapan dalam kegiatan advokasi tersebut?

14. Bagaimana sistem alokasi pendanaan dan penyalurannya?
15. Bagaimana proses kegiatan advokasi tersebut berlangsung?
16. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi saat advokasi tersebut dilakukan?
17. Bagaimana langkah-langkah alternatif yang diambil guna menghadapi kendala atau hambatan tersebut?
18. Bagaimana hasil dari kegiatan advokasi tersebut?



*Lampiran ke 3*

**PANDUAN OBSERVASI**

1. Peneliti mengamati kondisi sekretariat Lembaga DPP HWDI.
2. Peneliti mengamati kondisi pengurus dan anggota Lembaga DPP HWDI.
3. Peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga DPP HWDI.

*Lampiran ke 4*

**PANDUAN DOKUMENTASI**

**A. Melalui Arsip Tertulis**

1. Mencari literatur yang didalamnya terdapat kajian tentang:
  - a. Sejarah terbentuknya DPP HWDI.
  - b. Visi dan Misi DPP HWDI
  - c. Tujuan DPP HWDI
  - d. Program kerja DPP HWDI
  - e. Kegiatan DPP HWDI
2. Mencari literatur yang didalamnya terdapat kajian tentang kebijakan hasil dari advokasi yang dilakukan oleh DPP HWDI
  - a. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
  - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  - c. Laporan Bayangan Implementasi CRPD tahun 2017

**B. Melalui Arsip Audio Visual**

1. Mencari video dokumenter tentang kegiatan advokasi yang dilakukan oleh DPP HWDI:
  - a. Diskusi Publik Penerapan Prinsip-Prinsip CRPD
  - b. HWDI inspirasi tanpa batas

Lampiran ke 5

## LAMPIRAN FOTO



Gambar 1: Kegiatan *Workshop* sosialisasi hak-hk wanita disabilitas di Lampung bulan April tahun 2014



Gambar 2: Rapat penyantunan hak-hak wanita disabilitas dalam Rencana Undang-undang Penyandang Disabilitas



Gambar 3: Diskusi publik penerapan prinsip-prinsip CRPD



Gambar 4: Rapat Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas





Gambar 5: Saya dan pengurus HWDI beserta Mitra HWDI *Asean Disability Forum* dan Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus



Gambar 6



Gambar 7

Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Walin Hartati selaku Sekertaris Umum; dan gambar 7: wawancara dengan Ibu Irda Nely selaku Bendahara umum,



Gambar 8



Gambar

9

Gambar 6: Wawancara dengan Kak Nila Krisdawati selaku anggota pengembangan jaringan dan kemitraan ; dan gambar 9 wawancara dengan Kak Feby selaku wakil Bendahara 2 HWDI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

**KARTU HADIR MUNAQOSAH**

Nama : To'atin  
NPM : 1541020110  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Pembimbing I : Prof. Dr, Khomsahrial Romli, M.S  
Pembimbing II : Dr. M. Sifuddin, M.Pd  
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat

No	Nama	Judul	Tanggal	Notulen	Paraf
1.	M. Khotib Nawawi	Metode Dakwah Hi. Umar Jaya kepada Jamaah Pengajian Ibu-ibu (Studi kasus pada majelis Taklim Nurul Falah Dusun Simpang Sari Desa Baru Ranji Lampung Selatan)	16/3/17	Yunidar Cut Mutia, S.Sos.i, M.Sos.I	
2.	Nursiyah	Pemberdayaan Nara Pidana melalui Agro Bisnis Sayuran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wayhuwi Bandar Lampung	13/9/17	Zamhariri, S.Ag., M.Sos,I	
3.	Muhamad Alfian Nurhidayat	Dakwah Bilhal dalam Kpemimpinan Khalifah Umar bin Khatab	20/3/17	Septi Anggraini, M.Pd,	
4.	Sudarsono	Pola Komunikasi Guru dalam Pembinaan Mental Spiritual Siswa MTSN 1 Bandar Baru	25/5/18	Septi Anggraini, M.Pd,	
5.	Melia Uswatun Khasanah	Manaqiban dalam Perspektif Dakwah (Studi kasus di Majelis Ta'lim Tarbiatul Solihin, RT.09, Pekon Sukoharum, Kec. Adiluwih, Pringsewu)	25/5/18	Septi Anggraini, M.Pd,	

Bandar Lampung, 2019  
Ketua Jurusan

Zamhariri, S.Ag., M.Sos,I  
Nip. 19730612003121002



### KARTU KONSULTASI

Nama / NPM : To'atin / 1541020110  
Pembimbing I : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si  
Pembimbing II: Dr. M. Saifuddin, M.Pd  
Judul : Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)  
dalam Pemberdayaan wanita disabilitas di Jakarta Pusat

No.	Hari/ tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Jum'at 29/6/18	Seminar Proposal		
2.	Kamis 12/7/18	Perbaikan proposal		
3.	Senin 12/11/18	Bimbingan BAB III		
4.	Kamis 1/9/18	Perbaikan BAB III		
5.	Selasa 19/2/19	Perbaikan BAB III		
6.	Selasa 12/3/19	Bimbingan BAB IV		
7.	Jum'at 15/3/19	Perbaikan BAB IV		
8.	Jum'at 5/4/19	Perbaikan BAB IV		
9.	Rabbu 27/3/19	Perbaikan BAB IV		
10.	Senin 15/4/19	Bimbingan BAB V		
11.	Kamis 25/4/19	Perbaikan BAB V		
12.	Rabbu 22 /5/19	Perbaikan BAB V		
14.	Kamis 13/6/19	ACC BAB I-V dari Pembimbing II		
15.	/6/19	ACC BAB I-V dari Pembimbing I		

Bandar Lampung, 2019  
Mengetahui,  
**Ketua Jurusan PMI**

H. Zamhariri, S.Ag,M.Sos.I  
**NIP.197306012003121002**

